



Sajian Tengah bulan November 2025, Serial Nomor 10.

STRATEGI MENINGKATKAN PENERIMAAN NEGARA

Laporan Riset Maya Dr.Jan
Hoesada, KSAP

PENDAHULUAN

Makalah disajikan terutama bagi keperluan pelaksanaan tugas KSAP menyikapi aspek akuntansi pemerintahan akibat perubahan organisasi/kelembagaan dan proses-bisnis penerimaan-negara, implikasi perubahan tersebut kepada kualitas kendali internal keuangan negara.

Makalah mendukung gagasan Kabinet untuk reformasi sistem penerimaan negara dan belanja negara yang lebih bebas KKN.

Makalah berkualitas mencemaskan, sidang pembaca nan-arif di mohon mencari sumber lain yang lebih afdol.

Saat ini, nisbah/rasio penerimaan negara berada pada angka 12% dari Produk Domestik Bruto (PDB), dan pemerintahan Prabowo menargetkan peningkatan hingga 23% dalam waktu lima tahun.

Muhamad Wildan, 2025, menyajikan artikel berjudul *Sudah Terbit! RPJMN 2025-2029 Muat Pembentukan Badan Penerimaan Negara*, antara lain mengungkap bahwa Pemerintah tetap berencana untuk membentuk badan penerimaan negara (BPN) guna meningkatkan rasio pendapatan negara menjadi sebesar 23% dari PDB sesuai dengan janji Presiden Prabowo Subianto sepanjang kampanye Pilpres 2024. Wacana tersebut termuat dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dalam Perpres 12/2025.

Pembentukan badan penerimaan negara dianggap perlu untuk meningkatkan penerimaan perpajakan serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

"Rendahnya pendapatan negara di Indonesia saat ini disebabkan masih terdapatnya kesenjangan mencakup aspek administrasi (*administration gap*) maupun kebijakan (*policy gap*) yang memerlukan transformasi tata kelola kelembagaan sebagai *enabler* untuk optimalisasi pendapatan negara," tulis pemerintah dalam RPJMN 2025-2029, dikutip Senin (24/2/2025).

Dalam konteks perpajakan, tata kelola kelembagaan diperlukan untuk mengimplementasikan *core tax administration* secara terintegrasi, meningkatkan pelayanan dan kepatuhan pajak, serta mewujudkan kebijakan penerimaan pajak yang adil dan optimal.

Terkait PNBPN, perbaikan tata kelola diperlukan untuk mendorong optimalisasi PNBPN dengan tetap menjaga kualitas layanan publik, mendorong transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan pendapatan dari dividen BUMN, optimalisasi aset, dan sumber daya alam (SDA).

Menurut sumber AI, Kementerian Penerimaan Negara (Kemenkeu) adalah kementerian negara di Indonesia yang membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara. Kemenkeu bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran negara, termasuk penerimaan negara berupa pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan hibah. Kementerian ini dipimpin oleh Menteri Keuangan.

- **Tugas Kemenkeu:** Kemenkeu bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara.
- **Penerimaan Negara:** Kemenkeu bertanggung jawab atas pengelolaan penerimaan negara, yang terdiri dari:



➤ **Pajak:** Pajak adalah kontribusi wajib negara yang dipungut dari wajib pajak.

➤ **PNBP:** PNBP adalah penerimaan negara selain pajak, seperti tarif layanan, hasil pengelolaan kekayaan negara, dan lain-lain.

➤ **Hibah:** Hibah adalah pemberian dari pihak lain tanpa syarat.

• **Peran Kemenkeu:**

Kemenkeu juga memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk penyusunan anggaran, pengelolaan kas negara, dan penegakan hukum di bidang keuangan.

- **MPN (Modul Penerimaan Negara):** Modul Penerimaan Negara adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengelola penerimaan negara.
- **Organisasi Kemenkeu:** Kemenkeu memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- **Menteri Keuangan:** Menteri Keuangan adalah pemimpin Kemenkeu dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Saat ini, Menteri Keuangan adalah Sri Mulyani Indrawati.

Pada 2025 hingga 2029, penataan kelembagaan pendapatan negara akan diawali dengan tahapan perencanaan dan persiapan. Menurut pemerintah, perencanaan dan persiapan dimaksud mencakup reformasi administrasi dan penyempurnaan proses bisnis.

Kemudian, penataan kelembagaan akan dilanjutkan dengan tahapan internalisasi sistem baru untuk efektivitas administrasi dan kelembagaan.

Setelah itu, penataan kelembagaan akan dilanjutkan dengan tahapan implementasi secara menyeluruh yang disertai revidi atas efektivitas sistem pengumpulan pendapatan negara terhadap target rasio pendapatan negara.

Menurut pemerintah, pendapatan negara perlu ditingkatkan dalam rangka menciptakan ruang fiskal yang memadai. Studi komparatif di beberapa negara menunjukkan bahwa ruang fiskal yang memadai adalah salah satu prasyarat untuk menjadi negara maju.

"Dalam rangka mencapai sasaran Visi Indonesia Emas 2045, diperlukan kebijakan fiskal yang adaptif dan ruang fiskal memadai yang dapat memberikan stimulus terhadap perekonomian Indonesia sehingga dapat berkontribusi terhadap sasaran pembangunan yang ditetapkan," tulis pemerintah.

Strategi memperbesar penerimaan negara dapat dilakukan melalui peningkatan penerimaan pajak, optimalisasi PNBP, dan diversifikasi sumber pendapatan. Peningkatan penerimaan pajak dapat dicapai melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan pajak nirKKN, dan optimalisasi sistem perpajakan. Optimalisasi PNBP dapat dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan, serta penambahan jenis PNBP baru. Selain itu, diversifikasi sumber pendapatan dapat dilakukan dengan mendorong investasi asing, peningkatan ekspor, dan pemberdayaan UMKM.

Elaborasi sbb:

1. Peningkatan Penerimaan Pajak:

- Peningkatan tarif BM dan tarif Pajak yang berisiko degradasi kegiatan ekonomi karena penurunan daya beli masyarakat dan penurunan PDB, diwaspadai pemerintah nan-arif.
- Perluasan Basis Pajak: Melakukan identifikasi dan menarik lebih banyak wajib pajak, termasuk wajib pajak besar dan wajib pajak yang belum terdaftar.
- Peningkatan Kepatuhan Pajak: Meningkatkan edukasi dan sosialisasi perpajakan, serta memperketat penegakan hukum bagi wajib pajak yang tidak patuh.
- Optimalisasi Sistem Perpajakan: Melakukan digitalisasi sistem perpajakan untuk memudahkan pemungutan dan meningkatkan efisiensi, serta memberikan insentif bagi wajib pajak yang patuh.
- Ekstensifikasi Pajak: Menambah jenis pajak baru, seperti pajak digital, pajak karbon, dan retribusi sektor informal.

2. Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP):

- Intensifikasi Pemungutan: Melakukan pemungutan PNBP yang lebih giat, ketat, dan teliti.

- Ekstensifikasi Pemungutan: Menambah jenis PNBPN baru, seperti layanan pemeriksaan keimigrasian di atas alat angkut.
- Optimalisasi PNBPN dari Sektor Sumber Daya Alam: Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam oleh BUMN, seperti hasil tambang, minyak, gas, kehutanan, dan perikanan.
- Optimalisasi PNBPN dari Layanan Negara: Meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan negara, serta mendorong pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produktivitas.
- Setiap K/L diharapkan mencipta PNBPN baru misalnya Olimpiade Air Dunia, pembangunan berbagai Wisata Hutan Primer dengan *Green-Peace*, Universitas Riset dan Biotek dan berbagai Lembaga pelestari lingkungan, pembangunan berbagai *bonded-area* berbagai industrial-estate bertujuan ekspor, pembangunan industri Wisata Bahari dan Wisata Selancar (*surfing*), KPBU komersialisasi-wisata untuk berbagai pulau kosong¹ bersama jejaring investor & hotel internasional atau negara-lain, kemudahan perizinan/ perpajakan dan sistem keamanan khusus bagi PMA/PMDN HTI khusus penghijauan kembali hutan-rusak, dan/atau kerja-sama penghijauan dengan berbagai negara unggul-teknologi penghijauan & reboisasi.

3. Diversifikasi Sumber Pendapatan:

- Peningkatan Ekspor: Mendorong peningkatan daya saing industri dan ekspor, serta memberikan insentif bagi pelaku ekspor. Lapangan kerja internasional adalah target-pasar, bagi DepnakerTrans, ekspor SDM terdidik menjadi agenda-utama.
- Pemberdayaan UMKM: Memberikan dukungan dan insentif bagi UMKM untuk tumbuh dan berkontribusi pada perekonomian.
- Dukung Investasi Asing: Menarik investasi asing langsung (FDI) melalui berbagai insentif dan kebijakan yang kondusif.
- Pengelolaan Utang yang Berkelanjutan: Diversifikasi sumber pembiayaan dan restrukturisasi utang untuk mengurangi beban pembayaran.
- Setiap K/L berupaya menghasilkan pendapatan bagi APBN sesuai tupoksi masing-masing, misalnya Kementerian Kehutanan menawarkan kerja-sama eksploitasi hutan

¹ Sumber AI, Google menyatakan bahwa dari sekitar 17.000 pulau di Indonesia, diperkirakan hanya 30-35% yang berpenghuni. Artinya, sekitar 70% pulau di Indonesia merupakan pulau tak berpenghuni. Beberapa pulau tak berpenghuni yang terkenal antara lain Pulau Nipa, Pulau Pasumpahan, dan Pulau Langkadea.

- **Jumlah Pulau:** Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan ribuan pulau. Data terbaru dari Badan Informasi Geospasial (BIG) mencatat bahwa jumlah pulau di Indonesia mencapai 17.380 pulau.
- **Pulau Berpenghuni:** Dari jumlah pulau tersebut, hanya sebagian kecil yang berpenghuni. Perkiraan yang umum adalah sekitar 30-35% saja yang memiliki penduduk.
- **Pulau Tak Berpenghuni:** Sebagian besar pulau di Indonesia adalah pulau tak berpenghuni. Pulau-pulau ini seringkali memiliki keindahan alam yang luar biasa, namun belum terjalin aktivitas penduduk.
- **Potensi Pulau Tak Berpenghuni:** Pulau tak berpenghuni ini memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai lokasi wisata, penelitian, dan berbagai aktivitas lainnya. Pemerintah juga bisa mengoptimalkan potensi pulau-pulau ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah.

primer menjadi wana-wisata atau wisata safari kepada pabrik obat dan lembaga-lembaga riset obat-obatan, K/L Kelautan menawarkan kerjasama wisata bahari kepada hotel-hotel internasional, setiap provinsi & pemda membangun pulau-pulau kecil menjadi pusat-wisata bersama badan usaha taman-hiburan seperti Disney, berbagai hotel wisata internasional dan LSM Pelestarian Alam. Bila APBN reboisasi tak cukup, kerusakan hutan primer/sekunder karena kebakaran dan penebangan-liar harus segera diatasi dengan berbagai kemudahan fasilitas KPBU, serta berbagai kemudahan PMA/PMDN untuk membangun HTI. Pembangunan kawasan industri berbasis bonded-area bertujuan industri bertujuan ekspor pro pertumbuhan PDB, nir-polusi, menggunakan bahan baku DN dan membuka kesempatan alih-teknologi dan lapangan-kerja harus lebih diintensifkan.

Sekar Nasly, 2024, menyajikan artikel berjudul *Strategi Prabowo-Gibran Tingkatkan Penerimaan Negara Tanpa Kenaikan Pajak*, antara lain mengungkapkan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto telah merencanakan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan rasio penerimaan negara selama masa kepemimpinannya. Salah satu langkah yang disorot adalah pembentukan Kementerian Penerimaan Negara, yang akan menjadi bagian dari susunan kabinatnya. Kementerian ini dirancang untuk mengoptimalkan pendapatan negara tanpa harus menaikkan tarif pajak bagi para pelaku usaha.

Dalam kesempatan agenda Diskusi Ekonomi Pengusaha Internasional Senior KADIN Indonesia (07/10), Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan bahwa pembentukan Kementerian Penerimaan Negara ini memiliki tujuan utama untuk meningkatkan rasio penerimaan negara.

- Saat ini, nisbah/rasio penerimaan negara berada di angka 12% dari Produk Domestik Bruto (PDB), dan pemerintahan Prabowo menargetkan peningkatan signifikan hingga 23% dalam waktu lima tahun.
- Target ini akan dicapai dengan menutup kebocoran *penerimaan negara*, *memperluas basis perpajakan*, dan *memperkuat penegakan aturan di bidang perpajakan*.
- Meskipun target peningkatan penerimaan negara cukup ambisius, Prabowo memastikan bahwa kebijakan perpajakan yang diterapkan tidak akan membebani dunia usaha.
- Tarif pajak badan yang saat ini sebesar 22% akan diturunkan menjadi 20%, mendekati tarif pajak yang diberlakukan di Singapura dan Hong Kong. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian kepada pelaku usaha bahwa tidak akan ada peningkatan tarif pajak yang merugikan.

Fokus pada Kebocoran Penerimaan Negara

- Salah satu upaya utama yang akan dilakukan oleh Prabowo untuk mencapai target penerimaan negara adalah dengan *mempersempit ruang kebocoran penerimaan*.
- Selama ini, kebocoran pajak menjadi salah satu faktor yang menghambat optimalisasi penerimaan negara.
- Prabowo berencana memperluas objek perpajakan, dan semua wajib pajak harus memenuhi kewajibannya secara benar.
- Penegakan hukum di bidang perpajakan juga akan diperkuat, dengan dukungan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan teknologi informasi (IT). Dengan pendekatan ini, Indonesia diharapkan bisa melampaui rasio penerimaan perpajakan

negara-negara tetangga, seperti Kamboja yang mencapai 18% dan Vietnam yang mencapai 23% dari PDB.

- Dengan penutupan kebocoran pajak dan penggunaan teknologi modern, target peningkatan rasio penerimaan negara dapat tercapai tanpa perlu menaikkan tarif pajak.
- Mengutip sumber Kontan, Fajry Akbar, pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), memberikan beberapa pandangan mengenai pembentukan Kementerian Penerimaan Negara ataupun BPN, sbb :

- a. Ia menekankan pentingnya independensi lembaga ini dari intervensi politik. Jika BPN terlalu mudah diintervensi oleh pihak eksternal seperti pemerintah atau legislatif, maka efektivitasnya dalam mengoptimalkan penerimaan negara akan terganggu.
- b. Selain independensi, dibutuhkan fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di BPN. Agar BPN dapat berfungsi secara optimal, lembaga ini harus diberi wewenang untuk merekrut SDM yang kompeten sesuai keahlian, serta melakukan rotasi atau mengganti SDM yang tidak berkinerja baik atau berpotensi melakukan tindakan kecurangan.
- c. BPN memerlukan pendanaan yang kuat dan stabil untuk dapat beroperasi secara efektif.



d. BPN perlu memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan anggarannya.

e. Pendanaan yang tidak memadai akan menghambat upaya BPN dalam mencapai target-target penerimaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

f. BPN juga harus dapat beroperasi dengan prinsip-prinsip bisnis yang efisien dan tidak terlalu terbebani oleh birokrasi pelayanan publik yang kaku, agar BPN dapat menjalankan tugasnya dengan lebih cepat dan responsif terhadap perubahan situasi ekonomi yang dinamis.

- g. Target peningkatan penerimaan negara dicapai dengan pemanfaatan teknologi modern, antara lain kecerdasan buatan (AI) dan teknologi informasi (IT) yang lain.
 - Dengan teknologi ini, pemerintah dapat memantau dan menganalisis data perpajakan dengan lebih baik, sehingga kebocoran pajak bisa diidentifikasi dan dicegah.
 - Teknologi juga akan memudahkan pemerintah dalam memperluas basis perpajakan dan memastikan semua wajib pajak membayar kewajibannya.
- Dengan dukungan Bank Dunia, Prabowo optimistis Indonesia mampu mencapai *rasio penerimaan perpajakan sebesar 23%*, mengungguli beberapa negara tetangga, dengan menutup celah-celah kebocoran penerimaan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) yang terpisah dari Kemenkeu membutuhkan dukungan dan komitmen pemerintah, khususnya Menteri Keuangan.

Pembentukan BPN dapat mengakibatkan:

- Perubahan budaya kerja ASN
- Perubahan sistem akuntansi
- Kemungkinan “*abuse of power*” sehingga diperlukan sistem kendali internal anti KKN dalam BPN dan lembaga eksternal yang mengawasi BPN
- Perlu adanya amandemen atau penggantian beberapa undang-undang

Sekar Nasly, 2025, menyajikan artikel berjudul *Rencana Pembentukan Badan Penerimaan Negara Resmi Masuk RKP 2025*, antara lain mengungkapkan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengajukan program pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) ke dalam dokumen rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Program ini merupakan inisiatif yang diusung oleh Calon Presiden Prabowo Subianto selama kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. BPN nantinya akan menjadi badan yang memisahkan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari Kementerian Keuangan, dengan pemberian nama Badan Otorita Penerimaan Negara. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan rasio penerimaan perpajakan menjadi sebesar 10-12% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2025.

Langkah ini dianggap penting untuk mendukung pembiayaan pembangunan di Indonesia, sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045. Dokumen RKP 2025 juga menekankan perlunya percepatan implementasi *core tax system* dan penguatan pengawasan terhadap wajib pajak *High Wealth Individual* untuk mencapai target ini. Selain itu, akan dilakukan penajaman pada insentif pajak untuk mendukung sektor-sektor prioritas seperti pertanian, manufaktur, pariwisata, dan usaha mikro kecil dan menengah.

Prabowo Subianto dalam masa kampanye Pilpres lalu beberapa kali menyampaikan niatnya untuk melakukan pemisahan instansi Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai dari Kementerian Keuangan jika terpilih sebagai presiden. Program Badan Penerimaan Negara juga masuk ke dalam 8 Program Hasil Cepat Terbaik Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo mengemukakan bahwa pemisahan ini sesuai dengan praktek di negara-negara maju yang telah berhasil memisahkan antara pengambil kebijakan dan pengumpul pendapatan. Dengan program ini, diharapkan rasio penerimaan negara terhadap PDB dapat meningkat menjadi 23%, sesuai dengan visi yang tertuang dalam dokumen 8 Program Hasil Cepat Terbaik Prabowo-Gibran.

Potensi Tantangan dan Hambatan Pembentukan BPN sebagai berikut :

Pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) menghadapi beragam tantangan dan hambatan yang perlu diatasi agar pembentukan badan nantinya dapat berfungsi secara efektif. Berikut *sumber Pajakku* merangkum beberapa tantangan tersebut.

1. Resistensi dari Pihak-Pihak yang Terdampak

Pembentukan BPN mungkin akan mengubah dinamika kelembagaan dan kewenangan di dalam pemerintahan, sehingga dapat menimbulkan resistensi dari pihak-pihak yang terdampak langsung, seperti Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Upaya untuk mengatasi resistensi ini memerlukan diplomasi politik yang cermat dan pembicaraan terbuka untuk mencapai konsensus.

2. Kesiapan Infrastruktur Teknologi Informasi

BPN akan memerlukan infrastruktur teknologi informasi yang canggih dan terintegrasi untuk mendukung operasionalnya. Tantangan utama adalah memastikan kesiapan sistem yang dapat mengelola dan menganalisis data dengan cepat dan akurat. Selain itu, perlunya perlindungan data yang kuat untuk menjaga keamanan informasi yang sensitif.

3. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Pembentukan BPN membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan terlatih dalam bidang perpajakan dan pengelolaan keuangan negara. Tantangan ini termasuk dalam pengembangan keahlian pegawai yang ada serta rekrutmen dan pelatihan staf baru yang diperlukan. Penyediaan sumber daya manusia yang memadai membutuhkan investasi waktu dan sumber daya yang signifikan.

4. Koordinasi Antarinstansi

- BPN akan bekerja secara terintegrasi dengan berbagai lembaga pemerintah terkait, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Koordinasi yang efektif antar-instansi merupakan kunci kesuksesan dalam menjalankan tugasnya. Tantangan ini mencakup harmonisasi kebijakan, pembagian tugas, dan pertukaran informasi yang efisien di antara lembaga-lembaga tersebut.

5. Penerimaan dan Dukungan Masyarakat

BPN perlu mendapatkan penerimaan dan dukungan masyarakat untuk berhasil dalam tugasnya. Tantangan ini mencakup memberikan pemahaman yang cukup kepada masyarakat tentang peran dan manfaat BPN dalam meningkatkan penerimaan negara, serta membangun kepercayaan bahwa BPN akan menjalankan tugasnya secara transparan dan adil.

Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini dengan cermat, pembentukan BPN dapat menjadi langkah yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan penerimaan negara di Indonesia.

Sistem pengendalian-internal dan akuntansi pertanggung-jawaban BPN disusun berdasar SAP yang disusun KSAP.

Muhamad Wildan, 2025, menyajikan artikel berjudul *Soal Pembentukan Badan Penerimaan Negara, Ini Kata ADB Institute*, sumber DDT News, antara lain mengungkapkan bahwa Dekan Asian Development Bank (ADB) Institute Bambang Brodjonegoro mengatakan rencana pembentukan *semi-autonomous revenue agency* (SARA) harus memiliki tujuan yang jelas.

Jika pembentukan SARA dilaksanakan dengan tepat maka langkah tersebut bisa mendukung upaya peningkatan rasio perpajakan (*tax ratio*). Contoh sukses dari pembentukan SARA bisa

dilihat di Ghana. "Tahun 2009 ketika Ghana Revenue Authority (GRA) dibentuk, *tax ratio*-nya sekitar 10%. Pada 2022, meski cukup lama, mereka kelihatan punya grafik [*tax ratio*] yang cenderung terus meningkat, yang paling tinggi itu mencapai 14%," katanya, dikutip pada Senin (21/4/2025). Kala itu, GRA dibentuk untuk menggabungkan 4 badan penerimaan yang ada sebelumnya, yakni Internal Revenue Service (IRS); Value Added Tax Service (VATS); Customs, Excise, and Preventive Service (CEPS); dan Revenue Agencies Governing Board (RAGB). Meski GRA selaku SARA memiliki tanggung jawab untuk melakukan penilaian, pemungutan, serta pelaporan penerimaan pajak secara tersendiri, GRA tetap berada di bawah Kementerian Keuangan Ghana. "Jadi, tidak sepenuhnya otonom, dia semiotonom. Bagaimanapun *at the end* menteri keuangan itu harus pegang kendali. Sebagai bendahara negara, menteri keuangan harus memastikan untuk belanja negara uangnya itu cukup," ujar Bambang.

Seusai SARA dibentuk, lanjutnya, menteri keuangan NKRI tetap berwenang menentukan kebijakan fiskal atau pajak. SARA hanya diberi otonomi untuk mengadministrasikan pemungutan pajak. "Pajak itu tidak hanya sumber penerimaan negara, tetapi juga bisa menjadi instrumen untuk menarik investasi. *Fiscal policy* tetap harus ada di tangan menteri keuangan. Tetapi, upaya mencarinya yang harus benar-benar di tangan SARA ini," tuturnya. Sebagai informasi, Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki rencana untuk membentuk SARA bernama Badan Penerimaan Negara (BPN). Pembentukan BPN dipercaya bisa meningkatkan pendapatan negara menjadi sebesar 23% dari PDB. "Negara membutuhkan terobosan konkret dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri. Pendirian BPN ditargetkan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB mencapai 23%," bunyi dokumen visi, misi, dan program Prabowo.

Ilona Estherina, kontributor, menyajikan artikel berjudul *Sri Mulyani Libatkan 7 Instansi di Kementerian Keuangan untuk Dongkrak Penerimaan Negara*, sumber Tempo.Co, menjelaskan bahwa tujuh unit di lingkungan Kementerian Keuangan yang terlibat dalam program optimalisasi penerimaan negara ini antara lain DJP dan DJBC. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meresmikan program kerja sama atau *joint program* untuk mendongkrak penerimaan negara pada 2025.

- Program ini melibatkan tujuh unit atau lembaga di Kementerian Keuangan dan mulai berjalan pada Kamis, 27 Maret 2025. Sri Mulyani berujar, *joint program* ini diharapkan dapat meningkatkan potensi penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. "Optimalisasi penerimaan negara tahun 2025 melalui *joint program* dimulai hari ini," kata Bendahara Negara itu melalui keterangan resmi, dikutip Jumat, 28 Maret 2025. Tujuh unit di lingkungan Kementerian Keuangan yang terlibat dalam program optimalisasi penerimaan negara ini ialah Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Sekretariat Jenderal (Setjen), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Inspektorat Jenderal (Itjen), dan Lembaga National Single Window (LNSW).
- Menurut eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, kerja sama antar instansi ini bertujuan untuk meningkatkan rasio perpajakan Indonesia sesuai amanat Presiden Prabowo Subianto. "DJP, DJBC, Setjen, BKF, DJA, Itjen, dan LNSW akan saling bekerja sama menerjemahkan amanat Presiden ke dalam tugas dan fungsi Kemenkeu untuk meningkatkan penerimaan negara dan menciptakan fondasi fiskal yang berkelanjutan," kata Sri Mulyani.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu sempat mengungkapkan inisiatif strategis yang digencarkan Kementerian untuk optimalisasi penerimaan negara.

- Menurut dia, pemerintah tengah mencari sumber-sumber penerimaan yang masih bisa dioptimalkan.
- Anggito menyebut Kemenkeu telah mengidentifikasi lebih dari 2.000 wajib pajak atau WP yang akan diawasi, diperiksa, hingga dilakukan penagihan. Hal ini dilakukan melalui program kerja sama antara Eselon 1 Kementerian Keuangan. “Kami akan melakukan analisis, pengawasan, pemeriksaan, penagihan, intelijen, dan mudah-mudahan bisa mendapatkan tambahan penerimaan negara,” ucapnya dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Keuangan pada Kamis, 13 Maret 2025.
- Selain itu, Kementerian juga melakukan optimalisasi perpajakan transaksi digital di dalam dan luar negeri, termasuk pelacakan dan penelusuran (*trace and track*). “Kami juga melakukan program digitalisasi untuk mengurangi adanya penyelundupan, maupun untuk mengurangi adanya cukai dan rokok palsu dan salah peruntukan,” katanya.
- Kemudian, pemerintah bakal mengintensifikasi penerimaan negara, khususnya yang berasal dari batu bara, nikel, timah, bauksit, dan sawit. Kementerian, kata Anggito, akan segera menyampaikan perubahan kebijakan tarif dan layering, maupun harga batu bara acuan.
- Terakhir, Kemenkeu akan melakukan intensifikasi untuk beberapa PNBPN yang sifatnya layanan premium atau untuk menengah ke atas, yakni pada sektor imigrasi, kepolisian, dan perhubungan. “Kami coba mengintensifikasi untuk mendapatkan tambahan penerimaan,” tutur dia.

Rp



Sebagai informasi, pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dipatok sebesar Rp 3.005,1 triliun. Target pendapatan itu terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 2.490,9 triliun dan PNBPN sebesar Rp 513,6 triliun.

Adapun realisasi pendapatan negara hingga 28 Februari 2025 tercatat Rp 316,9 triliun. Kementerian melaporkan penerimaan perpajakan sebesar Rp 240,4 triliun, terdiri dari pajak 187,8 triliun dan penerimaan kepabeanan dan cukai Rp 52,6 triliun. Sementara PNBPN hanya sebesar Rp 76,4 triliun.

Pada pekan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penerimaan bruto APBN tumbuh 6,6 persen pada Maret 2025. Menurut dia, telah terjadi perubahan atau *turn around*, lebih baik dari yang disampaikan Kementerian Keuangan pada 13 Maret 2025. "Ini untuk menenangkan media dan market," ucapnya dalam konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa, 18 Maret 2025. Dia mengatakan posisi penerimaan negara ini positif sejak 1-17 Maret 2025. Sebelumnya, Sri mengakui penerimaan negara secara bruto sempat negatif 3,8 persen pada akhir Februari 2025.

PRINSIP MANAJEMEN PENERIMAAN NEGARA

Prinsip manajemen penerimaan negara adalah sbb :

- Sumber pendapatan negara utama adalah kemajuan-negara dalam membentuk budaya berani berbasis iklim demokratis nir-hipokrit & tepat-janji berdasar rerata tingkat pendidikan bangsa & tingkat inovasi, bukan kekayaan alam. Kemajuan negara menyebabkan perpindahan kelas negara, dari kelas negara-miskin mencapai negara-maju & makmur. Pembangunan basis penerimaan-negara berupa bangsa bermoral baik tersebut lintas Kabinet.
- Bila budaya-bangsa dan sistem demokrasi sehat , bila rerata pendidikan telah memadai, maka pemilu berkualitas dan pilihan pimpinan negara berkualitas , adalah modal dasar pembangunan penerimaan negara.
- Penerimaan negara harus berdasar sistem informasi penerimaan nan transparan dan akuntabel untuk membersihkan KKN penerimaan negara.
- Penerimaan negara berbentuk pendapatan negara dicatat dan dilaporkan berdasar standar akuntansi pemerintahan.
- Penerimaan utang negara bukan pendapatan negara.
- Upaya dan kebijakan memperbesar penerimaan pendapatan negara harus sesuai hukum ekonomi dan HAM. Sebagai misal, kebijakan menaikkan tarif pajak dapat berakibat kontra-produktif bagi pertumbuhan ekonomi.
- Dibutuhkan UU Pembangunan Landasan Kemakmuran karena Kabinet bermasa-kerja hanya 5 tahunan , terlampau pendek untuk membangun infrastruktur ideal penerimaan-negara nan-solid seperti ;
 1. Budaya jujur dan rajin bekerja (etos kerja),
 2. Kesadaran sosial anti-sara nan- kontributif tiap warga-negara untuk membangun iklim-perekonomian nan-kondusif .
 3. Kesadaran tiap warga untuk kewajiban pajak,
 4. Kesadaran perlunya peningkatan rerata pendidikan angkatan-kerja sebagai syarat masuk kelas negar-maju, untuk memerangi penangguran
 5. Pembangunan budaya pendidikan-formal berbasis iptek nan kreatif & berani berwira-usaha .

Di Indonesia, untuk memperbesar pendapatan APBN, pemerintah melakukan berbagai upaya, seperti:

- Meningkatkan penerimaan perpajakan tanpa dampak menurunkan pertumbuhan ekonomi
- Meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP)
- Meningkatkan penerimaan dari hibah
- Meningkatkan penerimaan dari hilirisasi industri dan ekspor
- Meningkatkan penerimaan dari penagihan dan pemungutan piutang negara
- Meningkatkan penerimaan dari penuntutan ganti rugi dan denda

Selain itu, pemerintah juga dapat:

- Memberikan insentif perpajakan kepada UMKM dan investasi
- Mendorong digitalisasi ekonomi
- Melakukan program pemberdayaan ekonomi, seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan BLT UMKM melalui kebijakan perpajakan
- Mendanai program pelatihan dan pengembangan keterampilan, seperti Kartu Prakerja
- Melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan APBN
- Menggunakan teknologi informasi dalam pengelolaan APBN

- Melakukan koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga terkait
- Merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek pembangunan yang di danai APBN

APBN merupakan pedoman bagi perekonomian yang bertujuan untuk: Menstabilkan perekonomian negara, Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Pemerataan pendapatan secara transparan dan efisien.

Untuk meningkatkan pendapatan negara, pemerintah dapat melakukan berbagai strategi, seperti:

- Pajak
 - a. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui digitalisasi pajak
 - b. Memperkuat kerja sama internasional dalam perpajakan
 - c. Menerapkan pajak atas layanan digital perusahaan non-residen
 - d. Menerapkan pajak lingkungan, seperti pajak karbon dan pajak emisi
- Hibah

Hibah merupakan sumbangan atau bantuan yang diberikan kepada pemerintah, baik dari dalam maupun luar negeri.
- Manajemen aset

Mengelola aset negara secara efektif dan efisien untuk memberikan manfaat maksimal
- PNBPN
 - Meminta K/L yang belum memiliki PP tentang jenis dan tarif PNBPN untuk mengusulkan PP tersebut ke Kementerian Keuangan
 - Merevisi jenis dan tarif PNBPN yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman
- Pertumbuhan ekonomi
 - Mempromosikan pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal yang
 - a. mencipta keamanan publik dan gairah wira-usaha,
 - b. perlindungan hak milik,
 - c. aktivitas bisnis,
 - d. penciptaan lapangan kerja, misalnya PMA / PMDN padat-karya
 - e. mendorong inovasi , misalnya PMA/PMDN Padat Pengetahuan
- Regulasi
 - Penerapan undang-undang harmonisasi kebijakan PMA/PMDN, peraturan perpajakan pro-pertumbuhan ekonomi dengan berbagai hukum positif lain , secara efisien dan efektif
- Kerja Sama

- Menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan Badan Usaha Mikro, Menengah (BUMEN) dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah
- Memperkuat kerja sama internasional dalam bidang perpajakan
- Edukasi
 - Melakukan edukasi dan sosialisasi pajak
 - Menyelenggarakan sistem informasi dan pendukung untuk membantu masyarakat dan wajib pajak

Keterangan sbb :

- Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam APBN. Pajak yang dikumpulkan pemerintah mencakupi:

- a. Pajak Penghasilan (PPh), yang dikenakan pada individu dan badan usaha yang memperoleh penghasilan.
 - b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang dikenakan pada transaksi jual beli barang dan jasa.
 - c. Bea Masuk dan Cukai, yang dikenakan pada barang impor serta produk tertentu seperti rokok dan minuman beralkohol.
 - d. Pajak Daerah, yang mencakup pajak kendaraan, pajak hotel, restoran, serta pajak lainnya yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah.
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
 - a. Pendapatan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti dividen dari perusahaan-perusahaan milik negara (misalnya Pertamina, PLN, dan Telkom).
 - b. Royalti dan PNBP dari sektor sumber daya alam, seperti hasil tambang, minyak dan gas bumi, serta sektor kehutanan.
 - c. Retribusi dari berbagai layanan publik, seperti biaya administrasi dokumen negara dan tarif tol jalan yang dikelola oleh pemerintah.

KENDALI INTERNAL ANTI KEBOCORAN PENERIMAAN NEGARA

Sekitar 20 tahun lalu, penulis membuat artikel berjudul Pengendalian Internal Birokrasi pemerintahan dalam domain cetak-biru Mencegah dan memberantas korupsi, antara lain mengungkapkan berbagai hal sebagai berikut.

Upaya pemberantasan korupsi dipelopori Angkatan Darat dan almarhum Presiden Soekarnoⁱ mengeluarkan Peraturan Penguasa Militer No.PRT/PMI/06/1957 (PPM 06), diganti UU 24/1960. Pada tahun 1967 Presiden Soeharto membentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) melalui Keppres 228/ 1967 berlandas UU 24 / 1960. Pada 1970 kembali Soeharto membentuk Komisi Empat dan Hatta sebagai penasihat Komisi. Hatta terkenal sebagai tokoh bersih dan sederhana. K4 bertugas membereskan skandal Pupuk Bimas dan Skandal Pertamina yang melibatkan beberapa Jenderal TNI-AD. Operasi tertib (Opstib) dibentuk berdasar INPRES 9/1977 bertugas memberantas pungutan liar. Pada tahun 1982 TPK yang dibentuk awal

pemerintahan Soeharto diaktifkan kembali dengan enam serangkai yang beken; Menpan JB Sumarlin, Pangkopkamtib Sudomo, Menkeh Ali Said, Jagung Ismail Saleh, Kapolri Awaludin Djamin dan Ketua MA Mudjono. Semua program tersebut terbukti tidak efektif. Lalu pada era reformasi muncul UU 31/1999, disempurnakan menjadi UU 30/2002 mengakomodasi munculnya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK) yang lebih dikenal dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada tahun 1998 mahasiswa melakukan demo untuk menumbangkan Orde Baru dengan menggunakan isu KKN sebagai motto pemersatuⁱⁱ. Gerakan mahasiswa tersebut berhasil menumbangkan Orde Baru, namun KKN tetap berlangsung.

Pada akhir 2004, KPK bermaksud membentuk kelompok penasihat KPK.

Tiga masalah pokok yang dihadapi akuntan pemerintahan dan auditor adalah lingkungan pengawasan umum, risiko melekat untuk berkorupsi dan sarana pengamanan². Agak sulit mencari negara percontohan yang telah membangun system kendali internal terhadap korupsi. AS merupakan negara yang telah merumuskan kendali internal terhadap korupsi, membuat daftar pertanyaan yang dapat digunakan sebagai masukan bagi RI dalam membangun internal control birokrasi kedap korupsi.

Butir butir tersebut adalah sbb :

A. Apakah lingkungan pengawasan umumnya memungkinkan korupsi ?.

1. Seberapa besar kadar pimpinan merasa berkepentingan atas sebuah sistem kendali internal yang kuat ?.
2. Apakah hubungan-hubungan pelaporan yang memadai sudah berjalan diantara unit-unit organisasi tersebut ?.
3. Sejauh mana organisasi itu memiliki pegawai-pegawai yang kompeten dan jujur ?.
4. Apakah wewenang didelegasikan dan dibatasi sewajarnya ?.
5. Apakah kebijakan dan prosedur dimengerti oleh karyawan ?.
6. Apakah prosedur anggaran dan pelaporan dirinci dengan baik dan dilaksanakan secara efektif ?.
7. Apakah kendali keuangan dan pengelolaan-termasuk setiap penggunaan komputer-dimantapkan dan diamankan dengan baik ?.

B. Sejauh mana kegiatan tersebut memikul risiko korupsi yang melekat ?.

1. Sejauh manakah program itu tidak jelas atau rumit tujuan-tujuannya, sangat terlibat dengan pihak ketiga yang diuntungkan; berkaitan dengan uang tunai; atau dalam urusan menyetujui permohonan, lisensi, izin atau sertifikat ?.
2. Berapa besar anggaran ?.
3. Seberapa besar pengaruh pendapatan keuangan diluar lembaga pemerintah. Semakin besar, semakin besar pula perangsang untuk korupsi.
4. Apakah banyak program baru dibawah tekanan jadwal dan pencapaian (raihan nyata)?.
5. Apakah tingkat sentralisasi dan desentralisasi sesuai bagi kegiatan kegiatan tersebut ?.
6. Apakah ada bukti bukti sebelumnya tentang kegiatan-kegiatan tidak sehat dilembaga pemerintah tertentu ?.

² Membasmi Korupsi, Robert Klitgaard, Yayasan Obor Indonesia, 1998, hal 112,

C. Bagaimana sistem pengamanan dan pengendalian korupsi ?.

1. Sumber informasi (data base dll) apa saja yang tersedia bagi para auditor dan penilai korupsi?.
2. Siapa saja nara sumber kompeten yang dapat diwawancarai untuk pengumpulan informasi ?.
3. Apakah telah dibuat secara nasional, pemetaan wilayah wilayah yang paling rawan korupsi , sistem dan prosedur yang paling rawan korupsi, agenda untuk menurunkan tingkat kerawanan ?.
4. Apakah langkah perbaikan dilakukan secara nyata secara bertahap, konsisten dan sistematis oleh pemerintah untuk butir 3 tersebut diatas?.³

Contoh kerangka kerja pembuat kebijakan anti korupsi⁴ adalah sbb .

Departemen Perpajakan Filipina membangun secara unik sarana penangkal korupsi sebagai berikut.

A. Strategi SDM Anti Korupsi : Memilih pegawai yang jujur dan cakap.

1. Rumuskan indikator ketidak jujuran dan bukti-ketidak jujuran.
2. Bangun administrasi kejujuran atau ketidak jujuran.
3. Lakukan pemeriksaan berkesinambungan atas kualitas administrasi kejujuran.
4. Gunakan catatan administrasi masalah untuk basis manajemen kejujuran.
5. Gunakan sumberdaya luar untuk menjamin kejujuran dan meraih persyaratan minimum yang harus ada pada entitas.
6. Memilih pegawai anti KKN dengan kriteria profesional. Meneliti *track record* individu, menyingkirkan yang tidak jujur. Memberlakukan peraturan baru melawan nepotisme.
7. Leadership antikorupsi⁵, keteladanan pemimpin yang mengubah sikap bawahan. Kepemimpinan yang vokal dan komunikatif dengan masyarakat tentang komitmen memberantas korupsi.

B. Strategi Imbalan Anti Korupsi.

1. Rumuskan ulang sistem imbalan pegawai.
 - a. Hapus imbalan yang tak masuk akal kecilnya untuk manusia normal, yang memberi "pengertian atau maaf" bagi suburnya perilaku KKN. Naikkan imbalan yang mampu mengurangi kebutuhan akan berkorupsi.
 - b. Bangun sistem imbalan kinerja pembongkaran korupsi.
 - c. Bangun sistem imbalan berbasis kinerja.
 - d. Bangun kriteria kinerja atas pembangunan "Sistem Bebas Korupsi (Corruption Proof System Design" yang mampu mencegah timbulnya korupsi.
 - e. Kembangkan imbalan dan sanksi non finansial. Meningkatkan rasa sakit pemecatan dengan pengumuman nama, publikasi kisah pelanggaran dan pelaku⁶.

³ Disarikan secara bebas , mengambil gagasan The Office Management and Budget, Internal Control Guidelines, Washington,D.C.: OMB,Desember 1982, Bab 4.

⁴ Dirangkai dari berbagai sumber oleh Robert Klitgard, Controlling Corruption, Membasmi Korupsi,Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 1998, halaman 124-126, dan hal 127-129 Peraga 2 tentang Penerapan Kerangka Kerja Peralatan Anti Korupsi yang digunakan oleh Departemen Pajak DN (Internal Revenue Bureau) Filipina, pembuat makalah ini memadukan berbagai sumber tersebut dan melakukan elaborasi secara bebas dengan basis ilmu Struktur & Perilaku Organisasi,Manajemen SDM, Corporate Culture dan ancangan pengendalian internal versi profesi akuntan.

⁵ Internal Revenue Bureau,Filipina ; kepemimpinan teladan dan mampu mengubah sikap.

⁶ Internal Revenue Bureau,Filipina ; bukan sekadar target pajak APBN tercapai.

- f. Secara seimbang memberi penghargaan atas kinerja pencapaian target ⁷, dan imbalan pencapaian target secara efisien dan tidak korup.
 - g. Sistem promosi atau demosi berdasar kinerja bersih KKN tersebut pada butir f.
2. Bangun sistem sanksi dan hukuman bagi koruptor.
 - a. Bangun sistem sanksi dan hukuman yang menakutkan, yang mampu menekan keinginan berkorupsi.
 - b. Bangun sistem wewenang untuk menerapkan sanksi langsung tanpa melalui prosedur panjang.
 - c. Angkat pejabat yang kompeten dalam melaksanakan wewenang tersebut (cerdas, ahli, berani, bersih, tegas, berpihak pada program anti korupsi).
 - d. Bangun sistem hukuman formal dan nonformal secara seimbang. Hukuman nonformal misalnya mutasi jabatan, publisitas, hilangnya reputasi.
 - e. Lakukan hukuman dan sanksi tanpa ditunda.
 - f. Hindari prosedur hukuman via pengadilan, apabila ber-tele-tele dan hasilnya tidak memuaskan.
 - g. Sistem *red-flag*, identifikasi pegawai yang diduga korup, identifikasi bagian masyarakat yang menghindari pajak⁸
- C. Bangun sistem informasi yang meningkatkan deteksi terhadap tindak KKN.
1. Perbaiki SIM menjadi SIM berancangan anti-korupsi.
 - a. Bangun sistem audit anti korupsi yang efektif, bangun forensic auditing.
 - b. Kumpulkan bukti terjadinya korupsi, bukti yang tak terbantahkan.
 - c. Lakukan evaluasi berkala tingkat kerawanan korupsi pada entitas yang dibenahi.
 2. Perbaiki organisasi anti korupsi.
 - a. Tambah kapasitas karyawan anti korupsi, kuantitas dan kualitas auditor, penyidik, pengawas, pengamanan internal.
 - b. Ciptakan iklim yang mendorong pegawai ingin dan bersedia melaporkan kegiatan tidak wajar⁹.
 - c. Ciptakan unit-unit baru kelembagaan anti KKN, misalnya KPK, Ombudsman, PPATK, KPU; dan evaluasi kinerjanya. Bentuk subunit baru dalam setiap organisasi untuk memerangi korupsi, misalnya Satker Audit Investigasi BPK dan BPKP, Direktorat Penyidikan OJK dan GPAF AIMRPK OJK (*anti fraud*), Direktorat *Whistle Blowing* pada OJK dan KPK.
 3. Gunakan informasi pihak ketiga, misalnya perbankan. Ciptakan iklim kondusif agar pihak ketiga ingin, berani dan bersedia memberi informasi.
 4. Gunakan informasi yang diberikan oleh klien, nasabah, WP, dan anggota masyarakat. Ciptakan iklim kondusif agar masyarakat ingin, berani dan bersedia memberi

⁷ Internal Revenue Bureau Filipina, bagi pengumpulan target pajak.

⁸ Internal Revenue Bureau Filipina, bukan hanya petugas pajak yang selalu dipersalahkan.

⁹ Misalnya kesadaran hukuman Allah Yang Maha Kuasa, percaya akan adanya surga-neraka. Misa tiap pagi dirumuskan dalam agenda Internal Revenue Filipina.

informasi. Bangun organisasi klien¹⁰ yang mampu bersuara bila diperlakukan secara tidak adil, terutama diperas oleh suatu pelayanan publik¹¹.

5. Utamakan pembuktian berlegitimasi hukum. Gunakan ancaman pembuktian terbalik untuk kasus-kasus atau jabatan-jabatan yang disepakati secara nasional.
- D. Periksa dan rombak hubungan serah terima jasa-kewajiban antara pegawai dengan nasabah, klien, WP . Lakukan evaluasi dan bangun keseimbangan antara kekuasaan/wewenang, pengendalian kekuasaan/wewenang dan sanksi penyalahgunaan wewenang. Apabila desain (rancang bangun) pengendalian kekuasaan/wewenang telah tertata baik, barulah wewenang diberikan. Apabila deteksi penyalahgunaan wewenang dapat dilakukan oleh para pengendali/pengawas dan sanksi secara efektif dapat diterapkan, barulah kekuasaan diberikan.
1. Hapus monopoli jasa, pelayanan dan perizinan sepanjang dimungkinkan. Bandingkan kinerja layanan yang sama dari lembaga-lembaga atau unit pelayanan yang berbeda-beda itu. Lakukan evaluasi kinerja pelayanan, buka opsi swastanisasi¹² selalu mungkin melalui studi kelayakan swastanisasi dan cost-benefit analysis. Lakukan upaya swastanisasi pelayanan tertentu, apabila pelayanan tidak efektif, efisien dan ekonomis.
 2. Bila pelayanan swasta akan sama buruknya, upayakan deregulasi dan layanan otomatis berbasis TI yang berbentuk layanan nir-tatap muka dan "negosiasi".
 3. Minimumkan kekuasaan-wewenang pegawai, sampai suatu batas kebutuhan minimum wewenang yang disyaratkan untuk mencapai target-raihan-layanan.
 - a. Rumuskan sasaran, peraturan, prosedur secara spesifik.
 - b. Bangun kerjasama Tim secara positif, lakukan evaluasi kinerja individu secara berjenjang.
 4. Jangan selalu menggunakan ancaman membelah wewenang (atau tugas besar) menjadi beberapa lembaga pengambilan keputusan untuk mengurangi wewenang, karena antar lembaga mungkin tetap dapat melakukan kolusi dan rantai prosedur layanan publik dan perizinan makin panjang.
 5. Hapus paradigma "Kalau dapat dipersulit, mengapa harus dipermudah?".
 6. Lakukan mutasi karyawan, terutama yang tertimpa banyak surat kaleng, investigasi dan rumor. Namun jangan terlampaui percaya surat kaleng, karena dapat diciptakan oleh kawan sekantor yang ingin menyingkirkannya. Mutasi pegawai nir-kasus harus berlandas suatu sistem yang menjamin agar KKN jangan berakar dan tidak "diwariskan" kepada suksesinya disatu pihak, memacu raihan kinerja pegawai yang bersangkutan dilain pihak.
 7. Reformulasi misi dan visi, masukkan kandungan anti KKN didalamnya. Buat APBN/D atau RKAP untuk menjalankan misi/visi tersebut secara konkret. Bangun entitas yang tahan korupsi.

¹⁰ Namun pada perpajakan Filipina, WP dan kelompok bisnis tidak di-organisasir, mungkin karena perbedaan kepentingan mendasar antara pengisian APBN (pajak) dan naluri WP membayar minimum.

¹¹ Pada banyak hal , publik sangat membutuhkan suatu jasa, sehingga memberi "tip" kepada pelayan publik secara suka cita dan sukarela. Pemberi tip merasa heran dan kecewa, apabila ditolak. Dengan demikian publik merupakan pemicu terpenting dalam tumbuhnya pungli atau bentuk KKN lain. Dalam banyak buku teks tentang korupsi, deteksi tindak KKN dan sanksi bagi publik tak diungkapkan secara memadai.

¹² Namun di Filipina pengumpulan pajak atau semacamnya oleh Swasta kelihatannya dihindari, mungkin karena Swasta adalah profit oriented-business.

E. Ubah Sikap Terhadap Korupsi.

1. Bangun budaya anti korupsi, perkuat dan perbesar barisan, lakukan infiltrasi secara sistematis terhadap semua kelembagaan melalui cara-cara sah dan terhormat, seperti pendidikan, pelatihan, teladan, pemahaman sistem anti KKN dan lain-lain.
2. Bangun kode etik pegawai, jalin kode etik dalam kegiatan kerja sehari-hari agar menjadi kebiasaan.

Gagasan pembentukan Lembaga/Organisasi anti korupsi mencakup berbagai hal sebagai berikut.

Banyak negara berkembang berminat membentuk organisasi khusus pemantau dan pemberantas korupsi. Indonesia membangun KPKPN, KPK dan banyak lembaga lain. Secara konseptual, hal-hal yang patut dipertimbangkan adalah sebagai berikut :

1. Membentuk Komisi independen anti korupsi, melapor langsung kepada Presiden. Seluruh karyawan Komisi juga harus independen, karena meng-administrasi perkara dan data rahasia.
2. Meminta dukungan masyarakat, menjaga harapan masyarakat agar tetap menyala.
3. Mempunyai kekuasaan penyidikan, menyita dokumen perjalanan, penahanan, pembekuan aset dan penyitaan, yang cukup besar.
4. Komisi juga bertugas mencegah terjadinya korupsi.
5. Anggota Komisi adalah individu independen dan kompeten yang tak takut menghadapi masalah sensitif, memerangi korupsi dengan sangat hati-hati, jangan sampai membahayakan karir dan reputasi pejabat kepolisian atau negara. Diperlukan kompetensi bidang keuangan dan akuntansi, perdagangan, pemerintahan dan berbagai kompetensi lain .
6. Pimpinan komisi diterima oleh masyarakat luas, dan diyakini pro pembangunan ekonomi negara. Reputasi anggota dalam masyarakat adalah segala-galanya, terutama dalam kompetensi dan kejujuran. Maka pemeriksaan latar belakang calon dan ukuran proper & fit harus diterapkan secara ketat. Para anggota Komisi dan karyawan Kantor Komisi harus tampil independen, mempunyai gaya hidup yang sederhana, harta kekayaan diungkapkan secara transparan kepada masyarakat, selalu menghindari terlibat pada suatu isu-gossip-rumor.
7. Imbalan anggota Komisi dan para karyawan Komisi harus lebih baik dari rata-rata tugas dan jabatan setara di bidang pemerintahan dan swasta. Komisi dan para karyawan Komisi mendapat hukuman berat bila melakukan KKN sendiri.
8. Masa bakti tertentu, misalnya 6 tahun.
9. Komisi mendaftar para pengkritik pemerintah dan menggunakannya sebagai nara sumber ahli.
10. Komisi harus mendapat dukungan penuh dari Kejaksaan Agung, karena penuntutan harus dilakukan oleh Kejaksaan.
11. Presiden memantau dari dekat kegiatan Komisi dan mempertanggungjawabkannya ke DPR.
12. Komisi harus mendapat latihan-latihan tertentu sebelum bertugas efektif, misalnya manajemen audit, forensic audit, sistem dan prosedur keuangan pemerintahan untuk meningkatkan kemampuan menangkap koruptor, melakukan reformasi organisasi & sistem-prosedur pemerintahan untuk mengurangi peluang korupsi, dan mengubah sikap stakeholder terhadap korupsi.
13. Organisasi Komisi dibagi menjadi beberapa departemen besar yaitu (1) Departemen Pemberantasan yang bertugas menyidik, menahan, menyita, mencegah keluar negeri, membantu pihak ketiga melakukan tuntutan-tuntutan atas tindak korupsi, (2) Departemen

Pencegahan yang melakukan inventarisasi titik rawan KKN tiap organisasi atau transaksi, mengusulkan perubahan sistem, prosedur dan struktur organisasi kelembagaan agar lebih "corruption proof", (3) Departemen Humas yang bertugas menggalang kekuatan masyarakat dalam dan luar negeri dalam mendukung, membantu pemecahan kasus korupsi, dan membangun masyarakat baru yang anti korupsi, (4) Departemen Terapi-Kejut yang mampu menimbulkan rasa takut pada para koruptor atau calon koruptor¹³. Sasaran umum adalah menyidik dan menuntut tindak pidana korupsi disegala bidang dan tingkatan, berdasar laporan masyarakat ke jaringan hotline-keluhan yang bebas bea dan kantor-kantor penampung keluhan-laporan masyarakat. Sasaran khusus adalah oknum yang bergaya hidup jauh diatas SPT atau gaji resmi, yang diawasi siang malam selama bertahun tahun untuk pendataan yang akurat.

Makalah tersebut menyimpulkan sbb.

Bangsa yang berorientasi pada kekuasaan tak akan mampu memerangi KKN. Apabila demokrasi tak tumbuh, KKN tumbuh subur. Aspek lain adalah nurani yang mati, tak ada rasa bersalah ketika mengumpulkan kekuasaan dengan segala akal dan cara, termasuk dengan cara KKN : kekuasaan dapat dibeli. Apabila kekuasaan diperoleh dengan KKN maka penggunaannya pastilah untuk KKN, bukan untuk rakyat banyak. Apabila rakyat telah menjual suaranya kepada suatu kekuasaan, maka suara rakyat tidak diwakilkan, tetapi telah "dibeli" penguasa. Kuncinya adalah Parpol yang bersih KKN dan tak mempermainkan Pemilu, membeli suara rakyat yang lemah kantung dan lemah iman.

Sebagian KKN disuburkan oleh sistem yang buruk, misalnya anggaran unuk suatu tugas yang minim bahkan tidak disediakan. Para pelaksana harus mencari dana sendiri untuk melaksanakan tugas tersebut melalui KKN, pungli atau semacamnya. Maka kegiatan ritual beragama dilakukan secara ketat sambil melakukan pelanggaran perintah Tuhan setiap hari.

BERBAGAI ISU TERKINI

Peringkat Indeks Persepsi Korupsi (CPI Ranking) diterbitkan setiap tahun oleh Transparency International, adalah sbb . organis.

Negara	Terakhir Sebelum Ini Referensi Satuan		
<u>Denmark</u>	1	1	2024-12
<u>Finlandia</u>	2	2	2024-12
<u>Singapura</u>	3	5	2024-12
<u>Selandia Baru</u>	4	3	2024-12
<u>Luksemburg</u>	5	9	2024-12
<u>Norwegia</u>	5	4	2024-12
<u>Swiss</u>	5	6	2024-12
<u>Swedia</u>	8	6	2024-12
<u>Belanda</u>	9	8	2024-12

¹³ Menyimak sukses Hongkong dalam melakukan gerakan anti korupsi, membersihkan aparat pemerintah terutama kepolisian dari budaya korupsi.

Negara	Terakhir Sebelum Ini Referensi Satuan		
<u>Australia</u>	10	14	2024-12
<u>Islandia</u>	10	19	2024-12
<u>Irlandia</u>	10	11	2024-12
<u>Estonia</u>	13	12	2024-12
<u>Uruguay</u>	13	16	2024-12
<u>Kanada</u>	15	12	2024-12
<u>Jerman</u>	15	9	2024-12
<u>Hong Kong</u>	17	14	2024-12
<u>Bhutan</u>	18	26	2024-12
<u>Seychelles</u>	18	20	2024-12
<u>Jepang</u>	20	16	2024-12
<u>Inggris Raya</u>	20	20	2024-12
<u>Belgia</u>	22	16	2024-12
<u>Barbados</u>	23	24	2024-12
<u>Uni Emirat Arab</u>	23	26	2024-12
<u>Austria</u>	25	20	2024-12
<u>Prancis</u>	25	20	2024-12
<u>Taiwan</u>	25	28	2024-12
<u>Bahama</u>	28	30	2024-12
<u>Amerika Serikat</u>	28	24	2024-12
<u>Israel</u>	30	33	2024-12
<u>Korea Selatan</u>	30	32	2024-12
<u>Chili</u>	32	29	2024-12
<u>Lithuania</u>	32	34	2024-12
<u>St Vincent Dan Grenadines</u>	32	36	2024-12
<u>Tanjung Verde</u>	35	30	2024-12
<u>Dominica</u>	36	42	2024-12
<u>Slovenia</u>	36	42	2024-12
<u>Latvia</u>	38	36	2024-12
<u>Qatar</u>	38	40	2024-12
<u>Arab Saudi</u>	38	53	2024-12
<u>Saint Lucia</u>	38	45	2024-12
<u>Kosta Rika</u>	42	45	2024-12
<u>Botswana</u>	43	39	2024-12
<u>Portugal</u>	43	34	2024-12
<u>Rwanda</u>	43	49	2024-12
<u>Siprus</u>	46	49	2024-12
<u>Republik Cheko</u>	46	41	2024-12
<u>Grenada</u>	46	49	2024-12
<u>Spanyol</u>	46	36	2024-12

Negara	Terakhir Sebelum Ini Referensi Satuan		
<u>Fiji</u>	50	53	2024-12
<u>Oman</u>	50	70	2024-12
<u>Italia</u>	52	42	2024-12
<u>Bahrain</u>	53	76	2024-12
<u>Georgia</u>	53	49	2024-12
<u>Polandia</u>	53	47	2024-12
<u>Mauritius</u>	56	55	2024-12
<u>Malaysia</u>	57	57	2024-12
<u>Vanuatu</u>	57	61	2024-12
<u>Yunani</u>	59	59	2024-12
<u>Yordania</u>	59	63	2024-12
<u>Namibia</u>	59	59	2024-12
<u>Slovakia</u>	59	47	2024-12
<u>Armenia</u>	63	62	2024-12
<u>Kroasia</u>	63	57	2024-12
<u>Kuwait</u>	65	63	2024-12
<u>Malta</u>	65	55	2024-12
<u>Montenegro</u>	65	63	2024-12
<u>Rumania</u>	65	63	2024-12
<u>Benin</u>	69	70	2024-12
<u>Pantai Gading</u>	69	87	2024-12
<u>Sao Tome Dan Principe</u>	69	67	2024-12
<u>Senegal</u>	69	70	2024-12
<u>Timor Leste</u>	73	70	2024-12
<u>Jamaika</u>	73	69	2024-12
<u>Kosovo</u>	73	83	2024-12
<u>Bulgaria</u>	76	67	2024-12
<u>Tiongkok</u>	76	76	2024-12
<u>Moldova</u>	76	76	2024-12
<u>Kepulauan Solomon</u>	76	70	2024-12
<u>Albania</u>	80	98	2024-12
<u>Ghana</u>	80	70	2024-12
<u>Burkina-Faso</u>	82	83	2024-12
<u>Kuba</u>	82	76	2024-12
<u>Hongaria</u>	82	76	2024-12
<u>Afrika Selatan</u>	82	83	2024-12
<u>Tanzania</u>	82	87	2024-12
<u>Trinidad dan Tobago</u>	82	76	2024-12
<u>Kazakhstan</u>	88	93	2024-12
<u>Makedonia</u>	88	76	2024-12

Negara	Terakhir Sebelum Ini Referensi Satuan		
<u>Suriname</u>	88	87	2024-12
<u>Vietnam</u>	88	83	2024-12
<u>Kolumbia</u>	92	87	2024-12
<u>Guyana</u>	92	87	2024-12
<u>Tunisia</u>	92	87	2024-12
<u>Zambia</u>	92	98	2024-12
<u>Gambia</u>	96	98	2024-12
<u>India</u>	96	93	2024-12
<u>Maladewa</u>	96	93	2024-12
<u>Argentina</u>	99	98	2024-12
<u>Etiopia</u>	99	98	2024-12
<u>Indonesia</u>	99	115	2024-12
<u>Lesotho</u>	99	93	2024-12
<u>Maroko</u>	99	97	2024-12
<u>Republik Dominika</u>	104	108	2024-12
<u>Serbia</u>	105	104	2024-12
<u>Ukraina</u>	105	104	2024-12
<u>Aljazair</u>	107	104	2024-12
<u>Brazil</u>	107	104	2024-12
<u>Malawi</u>	107	115	2024-12
<u>Nepal</u>	107	108	2024-12
<u>Niger</u>	107	125	2024-12
<u>Thailand</u>	107	108	2024-12
<u>Turki</u>	107	115	2024-12
<u>Belarus</u>	114	98	2024-12
<u>Bosnia Dan Herzegovina</u>	114	108	2024-12
<u>Laos</u>	114	136	2024-12
<u>Mongolia</u>	114	121	2024-12
<u>Panama</u>	114	108	2024-12
<u>Filipina</u>	114	115	2024-12
<u>Sierra Leone</u>	114	108	2024-12
<u>Angola</u>	121	121	2024-12
<u>Ekuador</u>	121	115	2024-12
<u>Kenya</u>	121	126	2024-12
<u>Sri-Lanka</u>	121	115	2024-12
<u>Togo</u>	121	126	2024-12
<u>Uzbekistan</u>	121	121	2024-12
<u>Djibouti</u>	127	130	2024-12
<u>Papua Nugini</u>	127	133	2024-12
<u>Peru</u>	127	121	2024-12

Negara	Terakhir Sebelum Ini Referensi Satuan		
<u>Mesir</u>	130	108	2024-12
<u>El-Salvador</u>	130	126	2024-12
<u>Mauritania</u>	130	130	2024-12
<u>Bolivia</u>	133	133	2024-12
<u>Guinea</u>	133	141	2024-12
<u>Gabon</u>	135	136	2024-12
<u>Liberia</u>	135	145	2024-12
<u>Mali</u>	135	136	2024-12
<u>Pakistan</u>	135	133	2024-12
<u>Swaziland</u>	135	130	2024-12
<u>Kamerun</u>	140	140	2024-12
<u>Irak</u>	140	154	2024-12
<u>Madagaskar</u>	140	145	2024-12
<u>Meksiko</u>	140	126	2024-12
<u>Nigeria</u>	140	145	2024-12
<u>Uganda</u>	140	141	2024-12
<u>Guatemala</u>	146	154	2024-12
<u>Kirgistan</u>	146	141	2024-12
<u>Mozambik</u>	146	145	2024-12
<u>Republik Afrika Tengah</u>	149	149	2024-12
<u>Paraguay</u>	149	136	2024-12
<u>Bangladesh</u>	151	149	2024-12
<u>Iran</u>	151	149	2024-12
<u>Republik Kongo</u>	151	158	2024-12
<u>Azerbaijan</u>	154	154	2024-12
<u>Honduras</u>	154	154	2024-12
<u>Lebanon</u>	154	149	2024-12
<u>Rusia</u>	154	141	2024-12
<u>Kamboja</u>	158	158	2024-12
<u>Chad</u>	158	162	2024-12
<u>Komoro</u>	158	162	2024-12
<u>Guinea-Bissau</u>	158	158	2024-12
<u>Zimbabwe</u>	158	149	2024-12
<u>Kongo</u>	163	162	2024-12
<u>Tajikistan</u>	164	162	2024-12
<u>Afganistan</u>	165	162	2024-12
<u>Burundi</u>	165	162	2024-12
<u>Turkmenistan</u>	165	170	2024-12
<u>Haiti</u>	168	172	2024-12
<u>Myanmar</u>	168	162	2024-12

Negara	Terakhir Sebelum Ini Referensi Satuan		
<u>Korea Utara</u>	170	172	2024-12
<u>Sudan</u>	170	162	2024-12
<u>Nikaragua</u>	172	172	2024-12
<u>Guinea Khatulistiwa</u>	173	172	2024-12
<u>Eritrea</u>	173	161	2024-12
<u>Libya</u>	173	170	2024-12
<u>Yaman</u>	173	176	2024-12
<u>Suriah</u>	177	177	2024-12
<u>Venezuela</u>	178	177	2024-12
<u>Somalia</u>	179	180	2024-12
<u>Sudan Selatan</u>	180	177	2024-12

Kerja sama antikorupsi di Indonesia melibatkan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun internasional, dengan fokus pada pencegahan, penindakan, dan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Kerja sama ini meliputi pertukaran informasi, bantuan hukum, dan pengembalian aset hasil korupsi yang berada di luar negeri.

Kerja Sama Internal:

- **Pencegahan:**

- Pendidikan:** KPK menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi untuk mendirikan pusat kajian antikorupsi dan program desa percontohan antikorupsi.
- Penyuluhan:** Penyuluh antikorupsi memberikan edukasi tentang peraturan perundang-undangan antikorupsi dan sanksinya.
- Supervisi:** KPK melakukan supervisi terhadap institusi penegak hukum lainnya dalam menangani kasus korupsi.

- **Penanganan Kasus:** KPK melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

□ **Sinergi:**

- Lintas Kementerian/Lembaga:** Kerja sama lintas kementerian/lembaga penting untuk memastikan efektivitas upaya antikorupsi.
- Pemangku Kepentingan:** Sinergi antar seluruh pemangku kepentingan dalam memberantas korupsi sangat dibutuhkan.

- Kerja Sama Internasional:

- Bantuan Hukum Timbal Balik:** Kerjasama ini memungkinkan pertukaran informasi dan bantuan dalam proses penanganan kasus korupsi yang melibatkan lebih dari satu negara.
- Ekstradisi:** Kerjasama ini memungkinkan pengiriman pelaku korupsi ke negara asal untuk diadili.

- c. **Pengembalian Aset:** Kerjasama ini memungkinkan pengembalian aset hasil korupsi yang berada di luar negeri ke Indonesia.
- d. **UNCAC:** Indonesia telah meratifikasi Convention Against Corruption (UNCAC) dan menjadikannya sebagai hukum nasional.
- e. **ASEAN-PAC:** Indonesia berperan aktif dalam ASEAN Parties Against Corruption (ASEAN-PAC) dalam kerangka kerja sama antikorupsi regional.

Contoh Kerja Sama:

- **KPK dan UNODC:** KPK telah menjalin kerja sama dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam berbagai bidang, seperti pengembangan sistem whistleblower dan kampanye antikorupsi.
- **KPK dan Maladewa:** KPK telah menjalin kerja sama dengan Anti-Corruption Commission (ACC) Maladewa dalam pemberantasan korupsi.
- **KPK dan Koalisi Antikorupsi Indonesia (KAKI):** KPK menjalin kerja sama dengan KAKI untuk memperkuat jejaring antikorupsi.

Pentingnya Kerja Sama:

- **Korupsi sebagai Kejahatan Transnasional:** Tindak pidana korupsi seringkali melibatkan lintas negara, sehingga kerja sama internasional sangat penting untuk menangani kasus-kasus korupsi secara efektif.
- **Efektivitas Pencegahan dan Penindakan:** Kerja sama antar berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, dapat meningkatkan efektivitas upaya pencegahan dan penindakan korupsi.
- **Membangun Komitmen Bersama:** Kerja sama yang kuat menciptakan komitmen bersama dalam pemberantasan korupsi, yang merupakan kunci keberhasilan upaya antikorupsi.

Candra Tjujuchahaya, 2025, menyajikan artikel berjudul *Indonesia dan Inggris Perkuat Kerja Sama Pemberantasan Korupsi*, antara lain mengungkapkan bahwa kalau ada pejabat Indonesia yang melakukan korupsi dan uangnya lari ke Inggris, SFO siap membantu melacak dan mengembalikannya. KPK dan SFO punya sejarah panjang kerja sama, sejak 2010, sudah banyak bertukar informasi, data, dan pengalaman tentang korupsi dan pencucian uang, serta sering mengadakan pelatihan bersama. Salah satu bentuk nyata dari kerja sama ini adalah pelatihan teknis tentang investigasi yang akan digelar pada 25 Februari mendatang. Pelatihan ini melibatkan banyak pihak, seperti Kedutaan Besar Inggris, Polri, dan jaksa, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para penegak hukum dalam memberantas korupsi. Ketua KPK, Setyo Budiyo, bahkan menyinggung soal keinginan Indonesia untuk bergabung dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Ia berharap, kerja sama dengan SFO bisa mendukung upaya tersebut.

Kerja sama antara KPK dan SFO mengungkap kasus korupsi yang melibatkan PT Pertamina, PT Garuda Indonesia, Rolls-Royce, Airbus, dan Innospec. SFO berencana mengirim dua penyelidik senior ke Indonesia untuk berbagi praktik terbaik. Mereka juga berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan KPK dalam upaya pemulihan aset yang terkait dengan kasus korupsi.

Sumber Antara, 2018, menyajikan artikel berjudul *Inggris akui Indonesia maju pesat dalam memberantas korupsi*, antara lain mengungkapkan bahwa di Indonesia, seperti halnya di banyak negara, orang-orang kaya, kuat, dan memiliki keterkaitan dengan politik biasanya tidak menyukai lembaga antikorupsi karena bertentangan dengan kepentingan pribadi mereka. Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik menilai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia bergerak maju yang dibuktikan dari naiknya Indeks Persepsi Korupsi menjadi 96 pada 2017 dari 152 pada 2003. "Indonesia tumbuh sebagai negara G20 yang cukup menonjol, dan upaya pemberantasan korupsinya bergerak maju," kata Moazzam dalam diskusi "Evaluasi Capaian Indonesia atas Komitmen Antikorupsi Internasional" di Jakarta, Rabu. Kemajuan lain yang patut dicatat adalah keseriusan Indonesia mewujudkan komitmen pemberantasan korupsi yang disampaikan dalam London Anti-Corruption Summit pada Mei 2016 yang dihadiri 53 negara di mana Indonesia menyampaikan 19 komitmen rencana aksi pemberantasan korupsi yang 17 di antaranya sudah terpenuhi. Indonesia telah memperkuat sistem "whistleblower" dengan membuat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), mengembangkan basis data berdasarkan pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta baru-baru ini mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi. Perpres ini dianggap Moazzam sangat vital dalam mendorong transparansi data publik dan mencegah korupsi. Kemajuan perjuangan antikorupsi Indonesia sejak London Summit, menurut dia, juga tidak terlepas dari keinginan dan komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terus membangun reputasi yang semakin baik sebagai lembaga antikorupsi.

Menjalani sebagian besar karir diplomatnya di negara-negara berkembang di Asia Tenggara, Timur Tengah dan Afrika Timur, duta besar keturunan Pakistan itu mengaku belum pernah menemukan sebuah lembaga yang sangat tangguh seperti KPK NKRI.

"Kesuksesan KPK mengungkap kasus tokoh-tokoh publik dan mengamankan negara dari korupsi harus diapresiasi dan didukung," kata dia.

Selain pemerintah dan penegak hukum, upaya pemberantasan korupsi juga harus didukung oleh seluruh masyarakat, terutama organisasi masyarakat sipil dan media.

"Di Indonesia, seperti halnya di banyak negara, orang-orang kaya, kuat, dan memiliki keterkaitan dengan politik biasanya tidak menyukai lembaga antikorupsi karena bertentangan dengan kepentingan pribadi mereka. Karena itu meski mencatat kemajuan, tetapi Indonesia harus terus berjuang melawan korupsi karena ini sangat penting untuk masa depan bangsa," kata Moazzam.

Aji Prasetyo, 2018, menyajikan artikel berjudul *Membandingkan Korupsi di Denmark dan Inggris*, antara lain mengungkapkan bahwa Sulitnya memberantas kasus korupsi ternyata tak hanya terjadi di Indonesia. Negara seperti Denmark yang menempati posisi kedua terbaik dalam Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Indeks/CPI) dan Inggris pun pernah mengalami hal yang sama. Dalam diskusi "Evaluasi Capaian Indonesia Atas Komitmen Antikorupsi Internasional" kedua negara ini pun berbagi cerita tentang bagaimana memberantas korupsi di negaranya masing-masing. Duta Besar Denmark untuk Indonesia Rasmus Abildgaard Kristensen mengaku tidak mempunyai cara khusus dalam memberantas korupsi di negaranya. Namun ia menggarisbawahi beberapa hal, pertama mengenai komitmen aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Untuk poin ini, ia menjelaskan aparat penegak hukum di Denmark memiliki pelatihan yang sama dalam pemberantasan korupsi sejak mereka masih di akademi. "Dalam sistem hukum dan aparat penegak hukumnya harus

tidak hanya bersih, tapi lebih dari itu karena jika kau mempercayakan pada orang-orang untuk memberantas korupsi sangat riskan. Untuk itu di akademi (kepolisian) dan sebagainya, mereka menghabiskan banyak waktu di bagian itu (pelatihan memberantas korupsi)," kata Abildgaard di Kedutaan Besar Inggris, Kuningan, Jakarta, Rabu (2/5/2018). Kemudian parlemen Denmark juga mempunyai komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi. Mereka juga memastikan kontrol terhadap pemerintah untuk bersikap transparan terhadap publik. "Saya rasa parlemen memiliki kewenangan untuk benar-benar memastikan pemerintah transparan. Seperti di Inggris ada rapat dengar pendapat dan setiap saat pemerintah dapat berkomunikasi dengan parlemen terkait kasus-kasus tertentu," terangnya. Dan anggota dewan disana, terang Abildgaard juga tidak mempunyai hak imunitas. Mereka bisa diproses hukum apabila diduga kuat melakukan pelanggaran pidana, termasuk kasus korupsi. Kemudian Ombudsman Denmark juga bekerja dengan cukup baik. Selain menerima pengaduan masyarakat, mereka juga memastikan adanya transparansi dalam membuat kebijakan. Dan Ombudsman ini juga terintegrasi langsung dengan parlemen.

CNN Indonesia , 2014 , menyajikan artikel berjudul *Inggris Bentuk Satgas Anti-Korupsi*, antara lain mengungkapkan bahwa Inggris akan membentuk satuan tugas pemberantasan korupsi dalam kepolisian, untuk memberantas kejahatan kerah putih di sektor keuangan. Satgas anti-korupsi Inggris akan mulai beroperasi pada April 2015, dan akan berada di bawah Badan Kejahatan Nasional Inggris, NCA, yang setara FBI. (Reuters/Mike Segar) London, CNN Indonesia -- Inggris berencana membentuk satuan tugas khusus dalam kepolisian yang berfokus pada pemberantasan korupsi dan kasus suap. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat pertahanan Inggris terhadap kejahatan kerah putih di sektor keuangan dan membasmi praktek penipuan. Para pelaku perbankan dan keuangan lainnya menyumbang sekitar sepersepuluh dari ekonomi Inggris. Namun sektor tersebut dipenuhi oleh berbagai skandal, sehingga penting bagi pemerintah bertindak tegas. Satgas yang akan mulai beroperasi pada April 2015, akan berada di bawah Badan Kejahatan Nasional Inggris, NCA, yang setara FBI. Satgas ini akan terdiri dari para pakar dari NCA dan spesialis dari sejumlah instansi pemerintah lainnya. "Sebagai salah satu pusat keuangan terbesar di dunia, Inggris memiliki kewajiban moral dan tanggung jawab global untuk memastikan bahwa para pejabat korup dan penjahat terorganisir tidak menyalahgunakan sistem kami," kata Menteri Bisnis Inggris, Matt Hancock, dilansir dari Reuters, Kamis (18/12). Pemerintah Inggris juga akan bekerja sama dengan Lembaga Penanganan Kasus Penipuan Serius, atau SFO, yang telah memimpin penyidikan dan penuntutan terkait sejumlah kasus korupsi dan penipuan. Namun, hingga saat ini, pemerintah Inggris belum memberikan detail kerjasama antar dua unit ini. Awal bulan ini, SFO mengamankan tiga pria yang diduga terlibat dalam kasus penipuan investasi biofuel senilai 23 juta Poundsterling, atau setara dengan Rp459 miliar. Lembaga ini juga menyelidiki sejumlah kasus penipuan kelas kakap, seperti manipulasi suku bunga antar bank dan dugaan suap yang menyeret perusahaan pembuat mesin, Rolls Royce Holdings Plc.

CONTOH KEBIJAKAN PENERIMAAN NEGARA

Pilihan strategi peningkatan penerimaan negara dari berbagai negara tampak sebagai berikut.

- 1.Saudi Arabia.

Minyak bumi merupakan komoditas strategis yang sangat berkontribusi pada pendapatan nasional Arab Saudi. Saudi Arabia sedang mengembangkan mata-pendapatan negara yang lain di luar minyak bumi, dengan berbagai bantuan pemikiran berbagai ekonom & pakar-ilmu pemerintahan di muka-bumi. Saudi Arabia sedang dalam proses penghijauan padang-pasir untuk pembangunan ekonomi pertanian.

2. Prancis.

Tak ada gunanya meningkatkan pendapatan-negara kalau belanja negara tak terkendali. Untuk meningkatkan pendapatan negara, Prancis berencana meningkatkan pajak bagi orang kaya dan mengurangi pengeluaran APBN.

Kenaikan pajak

- Pemerintah Prancis berencana mengenakan pajak khusus untuk masyarakat berpendapatan tinggi.
- Menteri Keuangan Prancis, Eric Lombard, mengatakan bahwa orang-orang yang memiliki tabungan yang signifikan harus membayar pajak.

Pengurangan pengeluaran

- Pemerintah Prancis akan mengurangi pengeluaran publik riil.

Pemerintah Prancis akan mengombinasikan kenaikan pajak dan pengurangan pengeluaran sampai mencapai surplus €60 miliar (\$65,68 miliar).

Kondisi anggaran Prancis

- Pada Desember 2024, Prancis mencatat defisit anggaran pemerintah sebesar 156,30 miliar EUR.
- Defisit anggaran terus membengkak dan biaya pinjaman yang semakin tinggi.
- Pemerintah Prancis berambisi meningkatkan anggaran pertahanannya.

Mekanisme pemerataan fiskal

- Prancis juga memiliki mekanisme pemerataan vertikal yang diatur oleh Undang-Undang Keuangan Negara.
- Daerah yang berpendapatan di bawah rata-rata pendapatan nasional berhak mendapatkan dukungan/bantuan dari dana pemerataan.

3. Jepang .

Sebagai negara G7 terkemuka, pada tahun 2023, pendapatan negara berbentuk pajak mencapai 77.4 Triliun Yen Jepang. Pendapatan dari pajak korporasi dan iuran jaminan sosial merupakan sumber pendapatan amat besar, sehingga pemerintah mem-fokuskan perhatian/perlindungan kepada kesejahteraan / kemakmuran korporasi dan karyawan korporasi.

Strategi Jepang meningkatkan pendapatan negara dengan

- Tarif pajak lebih tinggi.
 - a. Pajak konsumsi 10 % sebagai mata APBN penerimaan terpenting.
 - b. Pajak Penghasilan.
 - c. Pajak Korporasi tertinggi pada tataran G7.
 - d. Iuran Jaminan Sosial , sekitar 41 % pendapatan negara.
- Mendorong pertumbuhan ekonomi dan kebijakan perlindungan luas-jangkauan, volume kegiatan & laba korporasi.
- Meningkatkan iuran jaminan sosial , meningkatkan nisbah pendapatan-pajak (tax revenue) vs PDB.

Kebijakan lain

- Pemerintah menerbitkan surat utang untuk belanja RAPBN tatkala pendaptan pajak tak cukup untuk belanja APBN.
- Terdapat APBN bantalan pengaman ledakan biaya hidup rumah-tangga.

Strategi nasional & APBN Jepang berciri:

- Meningkatkan penerimaan pajak,
- Kenaikan upah,
- Peningkatan belanja pertahanan,
- Peningkatan belanja/pengeluaran jaminan sosial.

Penjelasan

- Pemerintah Jepang berencana menerapkan pemotongan pajak pada Juni 2025 untuk menodong pertumbuhan ekonomi .
- Kenaikan upah secara nasional diperkirakan akan mendorong pertumbuhan pendapatan per kapita.
- Peningkatan belanja pertahanan dilakukan untuk melawan ancaman regional yang ditimbulkan oleh Korea Utara dan China, untuk meningkatkan stabilitas perekonomian Jepang.
- Peningkatan pengeluaran jaminan sosial dilakukan untuk mengatasi penurunan populasi di Jepang , meningkatkan jumlah SDM profesional/produktif masa-depan.
- Untuk meningkatkan surplus APBN, Kementerian Keuangan Jepang berencana meneliti pengajuan anggaran untuk memangkas total belanja.

Sejarah APBN sbb :

- Pada tahun fiskal 2024, pengajuan anggaran oleh badan-badan pemerintahan Jepang mencapai rekor tertinggi sebesar 114,39 triliun yen atau 779 miliar dolar AS.
- Defisit APBN. Menurut sumber *Trading Economics*, APBN pemerintah Jepang diproyeksikan akan cenderung sekitar -3,60 persen dari PDB pada tahun 2025 dan -3,50 persen dari PDB pada tahun 2026.

4.Luksemburg.

Luksemburg adalah negara berbasis pengetahuan dan teknologi-digital , sebagai *negara-keuangan dunia* terkemuka , meningkatkan pendapatan negara melalui sektor keuangan, perpajakan, dan perdagangan.

Sektor keuangan

- Luksemburg merupakan pusat perbankan swasta utama di Eropa atau dunia
- Luksemburg memiliki banyak bank, termasuk perbankan swasta, asuransi, dan investasi
- Sektor keuangan Luksemburg merupakan kontributor terbesar bagi perekonomiannya

Perpajakan

- Luksemburg menerapkan sistem pajak "teritorial" yang menguntungkan bagi korporasi dan orang kaya.
- Sebagai daya tarik, Luksemburg menawarkan tarif pajak perusahaan yang kompetitif
- Sebagai daya tarik, Luksemburg menawarkan berbagai insentif dan pengurangan pajak untuk menarik investasi asing , berorientasi pada PMA

Perdagangan

- Luksemburg berdagang dengan negara-negara seperti Jerman, Prancis, dan Belgia
- Luksemburg memproduksi dan mengekspor besi dan baja

Ekonomi berbasis pengetahuan dan digital

- Luksemburg menerapkan rezim pajak HAKI baru pada tahun 2008
- Luksemburg menyetujui dan menerapkan undang-undang HAKI baru pada tahun 2018

Pada tahun 2021, IMF memproyeksikan bahwa warga Luksemburg menikmati produk domestik bruto per kapita tertinggi di dunia pada tahun 2022.

Pengertian Sistem Pajak Sadar HAKI adalah sbb :

- Pajak royalti adalah pajak yang dikenakan atas karya intelektual yang dilindungi HAKI, seperti paten, merek dagang, desain, dan karya ilmiah. Pajak royalti termasuk dalam PPh 23.
- HAKI adalah singkatan dari Hak Kekayaan Intelektual. HAKI merupakan perlindungan hukum atas karya-karya kreatif, seperti buku, musik, film, dan desain.
- Pajak royalti dibayarkan oleh wajib pajak atas karya intelektual yang digunakan.
- Sebagai misal, tarif pajak royalti adalah 15% dari penghasilan bruto. Jika penerima royalti tidak memiliki NPWP, tarifnya dinaikkan menjadi 30% atau 100%. Pajak royalti terutang pada saat yang ditentukan dalam kontrak.

Tujuan negara menuburkan HAKI adalah:

- Memberikan insentif kepada pencipta untuk terus berinovasi dan menciptakan.
- Melindungi karya dari penggunaan tanpa izin.
- Memfasilitasi transfer teknologi dan pengetahuan antara berbagai sektor industri.

- Mendorong inovasi dan kreativitas masyarakat.
- Melindungi dari tindak plagiarisme.

HAKI sangat berarti dalam melindungi hak cipta, paten, merek dagang, maupun desain suatu industri.

Negara makin makmur bila makin kaya HAKI.

5. Belgia.

Belgia memiliki ekonomi nan-kuat, ditandai dengan PDB per kapita yang tinggi, beragam basis industri, dan jaringan transportasi yang baik. Belgia juga merupakan salah satu negara pendiri Uni Eropa dan zona euro.

PDB per kapita

- Belgia berada di peringkat keenam di Uni Eropa untuk PDB per kapita.
- PDB per kapita Belgia jauh di atas rata-rata Uni Eropa.
- IMF memproyeksikan PDB per kapita Belgia rata-rata sebesar USD 58.256 pada tahun 2025.

Basis industri

- Belgia memiliki basis industri dan komersial yang beragam.
- Sektor tersier menyumbang 71,1% dari PDB dan mempekerjakan 79% dari populasi aktif.
- Belgia merupakan negara penghasil baja utama.
- Belgia juga memiliki sektor makanan, kimia, dan farmasi yang besar.

Jaringan transportasi

- Belgia memiliki jaringan transportasi yang berkembang dengan baik.
- Lokasi geografis Belgia yang berada di tengah dunia juga mendukung perekonomiannya.

Kebebasan ekonomi

- *The Heritage Foundation menyatakan bahwa Belgia memiliki skor kebebasan ekonomi yang lebih tinggi daripada rata-rata dunia dan regional.*

Belgia memilih strategi defisit APBN Terkendali.

- Belgia mencatat defisit Anggaran Pemerintah sebesar 4,20 persen dari Produk Domestik Bruto negara pada tahun 2023.
- Anggaran Pemerintah di Belgia rata-rata sebesar -2,52 persen dari PDB dari tahun 1995 hingga 2023, mencapai puncak tertinggi sebesar 0,20 persen dari PDB pada tahun 2001 dan rekor terendah sebesar -9,00 persen dari PDB pada tahun 2020.

6. Belanda.

Belanda merupakan negara maju dengan ekonomi yang kuat, ditandai dengan PDB per kapita yang tinggi dan peringkat kebebasan ekonomi yang tinggi. Belanda juga merupakan salah

satu pendiri lembaga ekonomi dunia seperti Uni Eropa, Organisasi Perdagangan Dunia, dan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi.

Kekuatan ekonomi Belanda

- PDB per kapita (nominal) tertinggi ke-11 di dunia pada tahun 2023
- PDB per kapita (PPP) tertinggi ke-13 di dunia pada tahun 2023
- Peringkat kebebasan ekonomi ke-10 dalam Indeks Kebebasan Ekonomi 2025
- Ekonomi terbuka yang sangat bergantung pada perdagangan internasional
- Industri jasa menyumbang sekitar tujuh persepuluh dari angkatan kerja dan sekitar dua pertiga dari produk domestik bruto (PDB)

Perdagangan Belanda

- Mitra dagang utama Belanda adalah negara-negara anggota UE
- Ekspor utamanya bergerak di bidang mesin, kimia dan pengolahan makanan
- Negara-negara mitra dagang utama Belanda adalah Jerman, Tiongkok, Belgia, Amerika Serikat dan Britania Raya

Kelemahan ekonomi Belanda

- Tingkat utang rumah tangga swasta yang sangat tinggi
- Populasi yang menua, yang berarti sistem pensiun berada di bawah tekanan
- Transisi hijau yang lemah

Belanda memilih strategi defisit APBN Terkendali.

Sumber *Trading Economics* memproyeksikan bahwa anggaran pemerintah Belanda akan defisit pada akhir tahun 2025.

Dalam jangka panjang, anggaran pemerintah Belanda diproyeksikan akan terus defisit.

APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) merupakan instrumen untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. APBN yang dikelola dengan baik dapat membantu negara mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kestabilan keuangan, dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk meningkatkan pendapatan negara, pemerintah Belanda dapat:

- Meningkatkan penerimaan pajak
- Meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP)
- Meningkatkan penerimaan hibah
- Melakukan alokasi anggaran untuk mendorong investasi di sektor-sektor yang berpotensi meningkatkan produktivitas nasional, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan

Komponen perpajakan merupakan penyumbang terbesar pendapatan negara.

- Dalam beberapa tahun terakhir, total penerimaan perpajakan menyumbang rata-rata 68,6% dari total penerimaan negara.

Belanda mencatat defisit anggaran pemerintah sebesar 7816 juta EUR pada kuartal keempat tahun 2024.

7. India.

Kecuali aspek defisit fiskal yang berbahaya, Penulis makalah ini memandang India sebagai salah satu model percontohan yang baik disimak sebagai bahan untuk penyusunan strategi APBN dan pembangunan bangsa cq perekonomian NKRI.

- Pada tahun 2020, Sumber CNBC Indonesia menyatakan bahwa India mencatatkan defisit fiskal yang menyentuh rekor terbaru di posisi US\$ 88,5 miliar (Rp 1.292,10 triliun) untuk periode April-Juni 2020. Jumlah ini sudah mencapai 83,2% dari target defisit untuk tahun fiskal saat ini. Jumlah defisit yang memecahkan rekor terbaru ini mencerminkan penerimaan pajak negara dan kebijakan *front loading* yang diterapkan pemerintah India.

Kebijakan front loading ekonomi adalah kebijakan yang memusatkan atau mengalokasikan sumber daya ekonomi di awal, sesuai sumber Industri Properti.Com.

Penjelasan sbb :

- Front loading dapat berupa kebijakan fiskal, seperti insentif pajak.
- Kebijakan ini dapat juga diartikan sebagai strategi untuk memusatkan pengeluaran atau investasi di awal periode tertentu.
- Contoh kebijakan front loading ekonomi adalah pemberian insentif PPN DTP Perumahan tahun 2022.
- Dalam konteks investasi, front loading dapat diartikan sebagai beban awal yang dikenakan saat pembelian investasi. Beban awal ini dipotong dari setoran awal atau dana pembelian.

Secara umum, front loading berarti menempatkan atau memusatkan sesuatu di awal periode atau kontrak.

Contohnya,:

- Memprioritaskan tindakan segera daripada penundaan
- Memusatkan biaya atau pengeluaran di awal proyek
- Menetapkan biaya atau manfaat pada tahap awal kontrak
- Memuat program pelatihan di awal sehingga peserta dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan sejak awal

Sejarah kebijakan tahun 2020 sbb :

Dilansir dari Reuters, ekonom memprediksi negara India akan mengalami defisit 7,5 % dari GDP untuk tahun fiskal 2020/2021 yang dimulai April ini. Jumlah ini lebih besar dari prediksi awal pemerintah yang sebesar 3,5%, diakibatkan karena kontraksi ekonomi yang tajam akibat Covid-19.

Menurut data pemerintah yang dirilis pada Jumat (31/7/2020), total penerimaan pajak bersih sepanjang tiga bulan ini turun 46% year on year (YoY) menjadi 1,35 miliar rupee (US\$ 18,05 miliar, 263 triliun), dibanding dengan 2,51 rupee di periode yang sama tahun lalu, penurunan ini terjadi walau pemerintah telah meningkatkan pajak atas bakar.

Total belanja pemerintah naik 13% YoY pada periode ini menjadi 8,16 triliun rupee dibanding dengan 7,22 triliun rupee di tahun lalu. Kenaikan ini karena *pemerintah meningkatkan belanja untuk program pangan gratis dan pekerjaan di desa untuk jutaan pekerja migran.*

Ekonom menilai *lockdown* yang diberlakukan lebih dari dua bulan sejak Maret 2020 merusak aktivitas ekonomi India dan ini berdampak negatif pada pengumpulan pajak dan rencana pemerintah untuk meningkatkan pendapatan melalui privatisasi perusahaan-perusahaan milik negara.

Pemerintah India juga telah meningkatkan target pinjaman menjadi 12 triliun rupee untuk tahun fiskal berjalan dari perkiraan sebelumnya 7,8 triliun rupee untuk pendanaan belanja negara.

Menurut jajak pendapat Reuters, pada tahun fiskal 2020 diperkirakan ekonomi India akan mengalami kontraksi 5,1% dan dalam skenario terburuk diperkirakan akan minus hingga 9,1%.

Situasi tahun 2024 sbb :

Pada tahun 2024, ekonomi India tumbuh 5,4%. Preeti Soni - Bloomberg News, menyatakan bahwa pertumbuhan Produk domestik bruto (PDB) India tercatat paling lambat dalam hampir dua tahun terakhir. Ini meredam prospek pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia yang prediksi bisa terjadi pada negara ini, dan situasi ini menambah kesulitan Perdana Menteri Narendra Modi untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi populasi muda di negara ini.

Ekonomi India hanya tumbuh 5,4% pada kuartal III-2024 secara tahunan, berdasarkan pengumuman yang disampaikan Kementerian Statistik, Jumat (29/11/2024).

Raihan tersebut merupakan angka terburuk sejak kuartal keempat 2022 dan lebih rendah dari proyeksi bank sentral sebesar 7% untuk periode tersebut.

Merosotnya laba perusahaan, penurunan upah dan inflasi telah melukai laju ekonomi yang sangat cepat dalam beberapa bulan terakhir, dan memberikan tekanan pada Bank Sentral atau Reserve Bank of India untuk melonggarkan kebijakan moneter.

Bank sentral telah mempertahankan suku bunga tidak berubah selama hampir dua tahun sekarang, tetapi akan lebih sulit untuk mempertahankan posisinya karena desakan untuk pelonggaran semakin keras.

Para menteri terkemuka di pemerintahan Modi baru-baru ini menyatakan bahwa *biaya pinjaman yang tinggi merugikan perekonomian*, namun Gubernur Shaktikanta Das telah menegaskan bahwa *penurunan suku bunga pada tahap ini akan "sangat berisiko" karena adanya risiko inflasi.*

Sumber *JurnalPatroliNews – India* , menyatakan bahwa *India semakin memantapkan posisinya dalam sektor pertanian dan UMKM melalui alokasi anggaran yang ambisius dalam Union Budget 2025/2026.*

Menteri Keuangan India, Nirmala Sitharaman, mengumumkan kebijakan ini pada awal Februari 2025, dengan *fokus pada insentif pajak dan kemudahan akses kredit untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.*

Postur anggaran ini sejalan dengan visi “Viksit Bharat” atau India Maju.

- Dengan total alokasi sebesar 550 miliar dolar AS dan proyeksi defisit fiskal 4,4% dari PDB senilai 179 miliar dolar AS, India menargetkan pertumbuhan inklusif yang bertujuan
 - a. *Mendorong laju pengentasan kemiskinan,*
 - b. *Akses universal terhadap pendidikan dan kesehatan, serta*
 - c. *Peningkatan partisipasi perempuan dalam ekonomi.*
 - d. *Salah satu agenda utama dalam anggaran ini adalah menjadikan India sebagai pusat produksi pangan global.*

Transformasi Pertanian dan UMKM

- *Sebagai dua pilar utama ekonomi, sektor pertanian dan UMKM mendapat perhatian khusus.*
- *Pemerintah merancang program revitalisasi lahan pertanian di 100 distrik dengan produktivitas rendah melalui*
 - a. *diversifikasi tanaman,*
 - b. *peningkatan irigasi, serta*
 - c. *penerapan teknologi berkelanjutan.*
 - d. *Langkah ini diperkirakan akan memberikan manfaat langsung bagi 17 juta petani di seluruh India.*

Infrastruktur dan Pendidikan: Pondasi Masa Depan

Pendidikan, inovasi, dan infrastruktur menjadi prioritas utama dalam APBN India 2025.

- *Pemerintah berencana membangun 50 ribu Laboratorium Atal Tinkering di sekolah-sekolah negeri untuk mendorong kreativitas dan keterampilan teknologi sejak dini.*
- *Program Bharatnet juga akan memperluas akses internet ke daerah pedesaan, sementara*
- *Skema BharatiyaBhashaPustak akan mendigitalkan sumber daya pendidikan dalam berbagai bahasa lokal.*

Dalam sektor infrastruktur, pemerintah mengalokasikan dana besar untuk

- a. *proyek Kemitraan Publik-Swasta (KPS) yang akan berjalan selama tiga tahun, termasuk*
- b. *skema pinjaman tanpa bunga bagi proyek pembangunan daerah.*
- c. *Di sisi lain, Misi Geospasial Nasional akan menerapkan teknologi canggih dalam modernisasi pencatatan tanah dan tata kota.*

Kebijakan Energi dan Pariwisata sbb :

- Akselerasi Pertumbuhan Sektor energi mendapat dorongan signifikan dengan reformasi kelistrikan serta target pengembangan 100 GW energi nuklir pada 2047.
- Sementara itu, sektor pariwisata akan mendapat manfaat dari inisiatif PM Gati Shakti, yang bertujuan meningkatkan infrastruktur serta mempromosikan 50 destinasi wisata utama untuk menarik wisatawan global.

Kebijakan Ekspor dan Integrasi Global sbb :

India menargetkan peningkatan daya saing ekspor melalui

- a. Misi Promosi Ekspor, yang difokuskan pada pembukaan akses pasar global bagi UMKM.*
- b. Infrastruktur digital Bharat Trade Net (BTN) akan menyederhanakan proses perdagangan, mempercepat dokumentasi ekspor, serta menyediakan solusi pembiayaan terintegrasi.*
- c. Selain itu, pemerintah berencana mengembangkan pusat logistik di kota-kota lapis kedua untuk mendukung ekspor barang bernilai tinggi, termasuk produk hortikultura.*

Dengan kebijakan strategis dalam APBN 2025/2026 ini, India berupaya memperkuat peran ekonominya di panggung global, baik sebagai

- *lambung pangan dunia maupun sebagai*
- *pemain utama dalam rantai pasokan internasional.*

Defisit fiskal India menyusut menjadi INR 13,47 triliun pada April-Februari 2024-25, dari INR 15,01 triliun dalam periode yang sama tahun fiskal sebelumnya.

- Total belanja meningkat sebesar 3,9% menjadi INR 38,93 triliun, sementara
- Pendapatan tumbuh sebesar 13,4% menjadi INR 25,46 triliun.

Statistik defisit fiskal sbb :

- Defisit fiskal India melebar menjadi INR 11,7 triliun pada April-Januari 2024-25, naik dari INR 11,0 triliun dalam periode yang sama tahun lalu, mencapai 74,5% dari target tahunan pemerintah, dibandingkan dengan 63,6% setahun sebelumnya.
- Defisit fiskal India menyempit sedikit menjadi INR 9.14 triliun pada April-Desember 2024-25, turun dari INR 9.82 triliun pada periode yang sama tahun fiskal sebelumnya.

Strategi peningkatan APBN Pendapatan India sbb :

- *India memotong pajak penghasilan untuk mendorong daya beli kelas menengah. Orang dengan pendapatan Rp240 per tahun bebas pajak penghasilan.*
- *India memotong tarif pajak penghasilan (PPh) perorangan untuk memacu daya beli kelas menengah. Insentif pajak ini bertujuan untuk menopang ekonomi India yang melambat karena risiko global yang memburuk.*

Menteri Keuangan India memberikan insentif pajak sebesar 1 triliun rupee atau setara Rp188 triliun kepada kelompok kelas menengah dengan asumsi kurs Rp188 per rupee India.

- WP yang berpenghasilan hingga 1,28 juta rupee atau sekitar Rp240 juta per tahun akan bebas PPh. Ambang batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dinaikkan dari sebelumnya 700 ribu rupee atau sekitar Rp131 juta per tahun.

"Langkah tersebut akan secara substansial mengurangi pajak kelas menengah dan menyisakan lebih banyak uang di tangan mereka, meningkatkan konsumsi rumah tangga, tabungan, dan investasi," kata Nirmala dikutip Bloomberg, Senin (3/2).

- Reformasi pajak akan memengaruhi 10 juta orang, meningkatkan jumlah warga yang tidak membayar PPh menjadi 60 juta orang. Jumlah ini sekitar 74 persen dari total wajib pajak.
- Nirmala juga mengumumkan defisit APBN yang sedikit lebih kecil untuk tahun fiskal mendatang, dengan peningkatan yang moderat dalam belanja infrastruktur.
- Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi hanya 6,4 persen di 2025, jauh di bawah target Perdana Menteri Narendra Modi yakni 8 persen.
- Target tinggi itu dipancang Modi untuk memenuhi tujuan ambisiusnya menjadikan India sebagai negara maju pada 2047.
- Namun, perekonomian diperkirakan tumbuh 6,3 persen hingga 6,8 persen di 2026.
- APBN India tahun ini memang dirancang berdasarkan latar belakang pertumbuhan ekonomi India yang paling lemah sejak pandemi.
- Selain itu, ada peningkatan risiko geopolitik usai Presiden AS Donald Trump menerapkan tarif tinggi pada produk-produk impor. Kebijakan proteksionis Trump ini mengguncang perdagangan global dengan ancaman tarif yang meluas.
- Pengusaha percaya pemotongan pajak India ampuh menggenjot daya beli masyarakat, karena ada lebih banyak uang yang dapat dibelanjakan di tangan masyarakat.
- Konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 60 persen dari produk domestik bruto (PDB) India.
- Namun, konsumsi rumah tangga India tertekan dalam beberapa kuartal terakhir. Konsumen menahan belanja di tengah inflasi tinggi dan yang kenaikan upah yang tak signifikan.
- "Reformasi pajak yang menguntungkan kelas menengah akan meningkatkan pendapatan yang dapat dibelanjakan, yang selanjutnya mendorong permintaan di seluruh kategori penting dan aspiratif," kata CFO Godrej Consumer Products Aasif

- *Direktur Pelaksana Volvo Group India Kamal Bali memprediksi pemotongan pajak ini diperkirakan akan membantu hingga 30 juta wajib pajak menghemat sekitar 100.000 rupee atau Rp18,9 juta setiap tahunnya.*
- *"Pemotongan pajak akan menjadi faktor yang membantu dalam mempercepat permintaan berbagai jenis produk konsumen (consumer products) ," kata RC Bhargava, ketua Maruti Suzuki India.*

Kebijakan Makan Siang Gratis India sbb :

Usaha pertama India melaksanakan program makan siang gratis atau Mid-Day Meal atau MDM ini dilakukan sekitar periode 1925 yang saat itu diperkenalkan untuk anak-anak dengan status sosial ekonomi miskin di kawasan Madras Corporation di negara bagian Tamil Nadu.

Seiring berjalannya waktu, program MDM ini tak berjalan mulus. Program ini penuh dengan korupsi dan penerapannya yang tidak tepat, sehingga sering kali membahayakan dan mengecewakan kelompok rentan yang ingin dilayani.

Sempat terjadi insiden keracunan makanan di sekolah di Bihar yang menewaskan 23 anak. Times of India pun pernah melaporkan bahwa 50 siswa sekolah dasar negeri harus dirawat di rumah sakit di Bihar setelah makan makanan yang terkontaminasi bangkai kadal.

Di India, program makan siang gratis yang disediakan pemerintahnya telah muncul sejak 1995. Program itu bagian dari Program Nasional Dukungan Gizi untuk Pendidikan Dasar (The National Programme of Nutritional Support to Primary Education/NP-NSPE) yang dikenal sebagai Mid-Day Meal Scheme (MDMS).

- P-NSPE merupakan program yang bertujuan untuk mengatasi "kelaparan di kelas bawah" dan mendorong anak-anak miskin, yang termasuk kelompok kurang mampu, untuk bersekolah secara teratur dan membantu mereka berkonsentrasi pada kegiatan kelas.
- Program ini pada dasarnya sebagai upaya untuk mengatasi masalah ketahanan pangan, kekurangan gizi, dan akses terhadap pendidikan dalam skala nasional.
- Sebagai catatan, MDMS ini merupakan program pemberian makanan sekolah terbesar di dunia yang menjangkau sekitar 12 crore anak di lebih dari 12,65 lakh sekolah/pusat EGS di seluruh negeri atau lebih dari 125 juta anak berusia 6-14 tahun.
- Seiring berjalannya waktu, MDMS berubah nama menjadi PM-POSHAN (POshan SHAkti Nirman).

Saat tahap awal, *salah satu permasalahan terbesar* yang dialami India yakni penerapan program dalam skala besar mengingat besarnya jumlah penerima program makan gratis ini.

- Berdasarkan pedoman yang ada, pemerintah dapat memobilisasi dukungan masyarakat dan mendorong kemitraan pemerintah-swasta untuk melaksanakan inisiatif tersebut.

- Pemerintah India pun mulai bermitra dengan organisasi nirlaba, seperti Akshaya Patra, untuk melaksanakan program ini dan menyediakan makanan tengah hari untuk anak-anak di sekolah.
- Pemerintah Karnataka adalah pemerintah negara bagian pertama yang melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam menyediakan makanan siang hari kepada anak-anak sekolah di India.
- Keterlibatan LSM dalam program multilateral/bilateral meningkatkan tingkat kerjasama. Lebih dari sekedar implementasi, LSM juga berperan dalam merancang dan mengelola program bersama dengan pemerintah di semua tingkatan.
- *Terbukti, keputusan untuk melibatkan LSM dalam pelaksanaan program pemberian makanan di sekolah membantu Pemerintah Karnataka meningkatkan efektivitas dan efisiensi upaya tersebut.*
- Kesuksesan kemitraan pemerintah-swasta dalam memberi makan anak-anak di sekolah pemerintah dan sekolah yang dibantu pemerintah menjadi sebuah preseden yang membuka peluang bagi Pemerintah India untuk berhasil memanfaatkan keterampilan dan sumber daya sektor swasta.
- Mekanisme pembiayaan program makan gratis di India adalah dengan membagi dana pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian dengan perbandingan 60:40 untuk biaya memasak dan honorarium.
- Pemerintah India menanggung seluruhnya biaya untuk komponen berulang lainnya. Untuk negara bagian dari Timur Laut (NER) dan negara bagian Himalaya, rasio pembagiannya adalah 90:10. Sementara Union Territories (UT) tanpa badan legislatif sepenuhnya didanai oleh Pemerintah India.
- Untuk periode 2021-2022, Pemerintah India mengeluarkan dana untuk MDMS sebesar 11.500 crore atau sekitar Rp23,7 triliun.
- Jika dibandingkan dengan anggaran untuk kementerian pendidikan, maka porsi MDMS hanya sekitar 12,5%. Lalu untuk tahun anggaran 2023/2024, India mengalokasikan anggaran INR 11.600 crore atau sekitar US\$1,4 miliar (Rp21,45 triliun) untuk MDMS.

8.AMERIKA SERIKAT

Pemerintah AS berupaya meningkatkan pendapatan negara melalui pajak, hibah/grant,dan berbagai transfer lain.

1. Pajak.

- PPh (Income taxes). PPh dikelola pemerintah pusat AS.
- Pajak Penjualan (Sales taxes)
PP adalah sumber utama pendapatan negara.
- Pajak Properti (Property taxes)
Pajak properti adalah sumber pendapatan pemerintah lokal (setara pemda di NKRI).
- Pajak lain (Other taxes)

Pajak lain-lain adalah

- a. Pajak penjualan tertentu.
- b. PBB
- c. Pajak lisensi kendaraan
- d. Pajak pertambangan

2. Pemberian Diperjanjikan Di muka (Grants) berbentuk sumbangan, hadiah, warisan, bantuan yang diperjanjikan di muka.

Kebijakan Sumbangan Diperjanjikan Di muka (Grant) AS sbb :

- Sumbangan Diperjanjikan Pemerintah Pusat (Federal grants)

Antara lain berupa :

- a. Medicaid

Medicaid adalah program asuransi kesehatan publik di Amerika Serikat yang membantu warga berpenghasilan rendah mendapatkan perawatan kesehatan. Dalam bahasa Indonesia, Medicaid dapat diartikan sebagai program bantuan cakupan kesehatan, seperti halnya BPJS NKRI.

Bagaimana Medicaid bekerja?

- Medicaid didanai oleh pemerintah federal dan negara bagian.
- Program ini dioperasikan di tingkat negara bagian, sehingga cakupan dan administrasinya berbeda-beda di setiap negara bagian.
- Medicaid hanya tersedia bagi individu dan keluarga yang memenuhi kriteria pendapatan tertentu.

Siapa yang bisa mendapatkan Medicaid?

- Anak-anak,
- Orang dewasa,
- Wanita hamil,
- Penyandang disabilitas,
- Warga lanjut usia yang rentan,
- Keluarga pekerja.

Bagaimana Medicaid berkembang?

- Medicaid awalnya hanya tersedia bagi mereka yang menerima bantuan tunai.
- Seiring berjalannya waktu, Kongres telah memperluas kelayakan bagi anak-anak dan kelompok dewasa tertentu.

Medicaid merupakan salah satu program perawatan kesehatan utama di Amerika Serikat, bersama dengan Medicare dan program kesehatan Militer dan VA.

- b. *Race to the Top*

Race to the Top (RTTT) adalah program Sumbangan Diperjanjikan kompetitif dari pemerintah Amerika Serikat yang artinya "Berlomba Menuju Puncak". Program ini bertujuan untuk mendorong inovasi dan reformasi di tingkat negara bagian.

- c. Transportation Investment Generating Economic Recovery .

Sumbangan Diperjanjikan bertujuan untuk pemulihan ekonomi berbasis investasi bidang transportasi , misalnya peringanan pajak kendaraan angkutan barang.

- Sumbangan Diperjanjikan Pelengkap (Matching Grants)

Pemerintah Pusat dan Pemda/Negara Bagian wajib menyediakan dana untuk memperoleh bantuan semacam ini.

- Sumbangan Diperjanjikan untuk Pelestarian Program Berulang (Maintenance-of-effort grants).

Pemerintah Pusat dan Pemda/Negara Bagian harus memelihara tingkat belanja tertentu yang bersifat abadi , misalnya Belanja Pemeliharaan Waduk , untuk menerima bantuan tersebut.

- Transfer dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah lokal.

- Pungutan biaya layanan dan penggunaan sarana-publik tertentu (*Service and utility charges*) , misalnya pungutan kepada sekolah tinggi tertentu, entitas pengelola dana asuransi.

9. ITALIA

Pemerintah Italia meningkatkan pendapatan-negara melalui

- Menaikkan tarif pajak PPh, PPN, dan PBB.
- Pungutan layanan-publik berbasis digital .

Strategi peningkatkan pendapatan negara Italia melalui intensifikasi dan ekstensifikasi semua jenis pajak , pungutan dan layanan-digital.

10. ARGENTINA.

Argentina berupaya meningkatkan pendapatan negara melalui

- Peningkatan pendapatan pajak
- Reformasi ekonomi.
- Berbagai kebijakan khusus untuk mencegah defisit APBN.

Peningkatan pendapatan pajak

- Peningkatan efisiensi penagihan pajak (*Tax collection efficiency*)
- Reorganisasi Ditjen Pajak dan Bea Meterai untuk pelancaran penagihan pajak.
- Peningkatan basis pajak PPh.Pada bulan Februari 2025 , PPh meningkat 86.5 % mencapai USD 12.107 Miliar.

Reformasi Ekonomi

- Kebijakan austerity atau pengetatan anggaran adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi defisit anggaran. Kebijakan ini dapat berupa pemotongan belanja, kenaikan pajak, atau keduanya.
- Tujuan kebijakan austerity
 1. Mengendalikan utang sektor publik,
 2. Meningkatkan kesehatan keuangan pemerintah,
 3. Mengurangi risiko gagal bayar.

Kebijakan austerity diterapkan tatkala:

- Ketika utang publik membesar sehingga risiko gagal bayar menjadi nyata
- Ketika ada kekhawatiran pengeluaran pemerintah melebihi pendapatan pemerintah

- Kebijakan SDA (*natural resources*)
- Menjaga posisi negara sebagai produsen industri pangan dan peternakan tergolong terbesar dunia.
- Pemanfaatan aset SDA , terutama tambang gas dan berbagai energi terbarukan.
- Pemanfaatan cadangan tambang Lithium.

10..PAPUA NEW GUINEA

Pemerintah Papua New Guinea berupaya meningkatkan pendapatan negara dengan reformasi- pajak , reformasi ekonomi dan desentralisasi fiskal.

- Pemotongan pajak untuk APBN 2024.
- Pemotongan pajak atas surat berharga pemerintah.
- Reformasi administrasi perpajakan untuk peningkatan kepatuhan pada hukum perpajakan dalam paket Medium Term Revenue Strategy (2023-2027) .
- Kebijakan fiskal pemikat PMA.
- Reformasi Ekonomi :
 1. Mendorong kandungan lokal industri DN , mengurangi impor.
 2. Menghapus hambatan birokrasi untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan memikat PMA.
- Desentralisasi fiskal sbb :
 - Pembentukan *National Economic and Fiscal Commission* (NEFC) yang melakukan penelitian kebutuhan tiap-pemda dan memberi rekomendasi besar dan bentuk alokasi APBN kepada APBD Pemda.

Kebijakan pemerintah ditujukan untuk

- Pertumbuhan ekonomi
- Pertumbuhan sektor privat

- Pertumbuhan lapangan kerja formal
- Kemakmuran jangka-panjang

11. KOREA SELATAN

Berdasar sumber *Our World Data*, Pemerintah Korsel berupaya meningkatkan pendapatan negara melalui

- Pajak
- BM
- BUMN
- Hasil modal (capital revenue)
- Bantuan asing
- Ekonomi perdagangan (trading economics)

Korea adalah negara OECD tergolong paling industrialis , pertumbuhan PDB Bruto sebesar rerata 5.7 % sepanjang 1980-2023 . Pertumbuhan ekonomi antara lain disebabkan ekspor barang jadi seperti elektronik, tekstil, kapal, mobil, baja dan BBM.

12. REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

Strategi pendapatan negara RRC (Republik Rakyat Tiongkok) melibatkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan pendapatan negara dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Beberapa strategi utama meliputi peningkatan aktivitas usaha dan bisnis, menjaga kestabilan moneter, serta reformasi pajak untuk meningkatkan pendapatan negara.

Berikut adalah elaborasi strategi pendapatan negara RRC:

1. Peningkatan Aktivitas Usaha dan Bisnis:

- Pemerintah RRC mendorong pertumbuhan Ooekonomi dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bisnis dan investasi, baik domestik maupun asing.
- Kebijakan ini mencakup reformasi regulasi, dukungan terhadap sektor swasta, dan pengembangan infrastruktur.
- Peningkatan aktivitas usaha dan bisnis diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pajak, baik pajak penghasilan maupun pajak perusahaan.

2. Stabilisasi Moneter:

- Pemerintah RRC menjaga stabilitas mata uang dan inflasi untuk menciptakan lingkungan yang stabil bagi investor dan pelaku usaha.
- Kebijakan moneter yang efektif membantu menjaga daya saing ekonomi dan mendorong investasi.
- Kestabilan moneter juga membantu pemerintah dalam mengelola pendapatan negara dan meminimalisir risiko inflasi yang dapat mengurangi nilai pendapatan.

3. Reformasi Pajak:

- Pemerintah RRC melakukan reformasi pajak untuk meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi ketimpangan pendapatan.
- Reformasi ini dapat meliputi perubahan tarif pajak, perluasan basis pajak, dan peningkatan efisiensi administrasi pajak.
- Peningkatan pendapatan pajak diharapkan dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program sosial lainnya.

4. Penggunaan Pajak Konsumsi:

- RRC memiliki ketergantungan yang tinggi pada pajak konsumsi untuk pendapatan negara, berbeda dengan AS yang lebih bergantung pada pajak penghasilan.

Pajak konsumsi, seperti pajak penjualan dan pajak pertambahan nilai, dapat menjadi sumber pendapatan yang stabil bagi pemerintah.

Peningkatan konsumsi masyarakat dapat meningkatkan pendapatan pajak, terutama jika kebijakan pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

5. Kebijakan Luar Negeri (*Belt and Road Initiative* - BRI):

- BRI (*Belt and Road Initiative*) yang diprakarsai oleh Presiden Xi Jinping bertujuan untuk membangun infrastruktur di berbagai negara, meningkatkan konektivitas, serta mendorong perdagangan dan investasi.
- BRI dapat meningkatkan pendapatan negara RRC melalui peningkatan investasi di berbagai negara dan pertumbuhan ekspor.
- Peningkatan investasi di negara-negara lain dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing produk RRC di pasar global.

6. Kerja Sama Ekonomi dengan Negara-Negara ASEAN:

- RRC melakukan kerja sama ekonomi dengan negara-negara ASEAN melalui perjanjian *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)* yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas hambatan.
- Kerja sama ini meningkatkan nilai ekspor dan impor antara RRC dan ASEAN, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan negara RRC.
- Peningkatan perdagangan dan investasi antara RRC dan ASEAN juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kedua belah pihak.

Dengan menerapkan berbagai strategi tersebut di atas, pemerintah RRC berusaha untuk meningkatkan pendapatan negara, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BRICS DAN MANAJEMEN PENDAPATAN NEGARA NKRI

Teddy Ferdian pegawai Direktorat Jenderal Pajak , 2025, menyajikan artikel berjudul *Gabung BRICS dan Benefit Perpajakan*, antara lain mengungkapkan bahwa

- Indonesia baru saja dinyatakan resmi bergabung menjadi anggota ke 10 organisasi blok ekonomi Brazil, Russia, India, China, and South Africa (BRICS) sejak 6 Januari 2025.
- Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan boleh dikatakan sebagai pendiri organisasi. Empat negara yang disebutkan di awal merupakan negara pelopor yang menggagas wadah ini pada tahun 2006, sampai akhirnya resmi berdiri pada 16 Juni 2009. Afrika Selatan kemudian bergabung menjadi anggota pada tahun 2010.
- Disamping Indonesia , berbagai negara bergabung pada tahun 2024, yaitu Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab.
- BRICS memiliki delapan negara mitra, yaitu Belarusia, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Malaysia, Thailand, Uganda dan Uzbekistan.
- BRICS merupakan organisasi ekonomi besar yang menggabungkan negara-negara berkembang dengan potensi ekonomi yang cukup menjanjikan, BRICS berangsur menjelma sebagai kekuatan geopolitik dunia , mungkin menjadi pesaing Group of Seven (G7) negara-negara maju-ekonomi.
- Pada bulan Agustus 2023, Indonesia diundang untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Johannesburg, Afrika Selatan. Saat itu, posisi Indonesia sebagai undangan dan belum memutuskan untuk bergabung. Indonesia kembali memenuhi undangan dalam KTT BRICS di Kazan, Rusia pada tanggal 23 – 24 Oktober 2024. Dalam KTT ini, Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan secara resmi keinginan Indonesia untuk bergabung dalam BRICS.
- Salah satu manfaat yang diperoleh Indonesia sebagai anggota BRICS adalah dalam hal perpajakan. Bergabung dengan BRICS dapat menjanjikan kerja sama multilateral yang intensif antar anggota dan jugadengan negara mitra BRICS, meningkatkan kesempatan untuk terlibat secara lebih aktif dalam pasar perdagangan internasional serta peluang investasi menjadi semakin terbuka lebar bagi Indonesia.
- Mengutip data dari Institusi Federal Amerika Serikat (AS), negara-negara yang tergabung dalam BRICS (sebelum Indonesia bergabung) mewakili sekitar 45 persen populasi dunia, 28 persen output perekonomian dunia, dan 47 persen minyak mentah global. Sepuluh anggota BRICS dan delapan negara mitra mewakili 41 persen Produk Domestik Bruto (PDB) global (diukur dari paritas daya beli).
- Sektor perpajakan sangat mungkin menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian dalam kerja sama multilateral yang semakin luas dibangun oleh Indonesia, antara lain pertukaran data untuk keperluan perpajakan sudah dilakukan oleh Indonesia melalui kerja sama dengan negara lain melalui Automatic Exchange of Information (AEOI), penagihan pajak, untuk dapat dilakukan terhadap aset wajib pajak di negara lain melalui kerja sama multilateral.

DAMPAK APBN MSG PADA PENDAPATAN NEGARA

Setara dengan teori ekonomi klasik yang meng-amar-kan, kalau sedang resesi ekonomi , maka APBN infrastruktur harus diperbesar untuk memberi lapangan kerja bagi masyarakat berstatus penangguran cq kelompok masyarakat terbawah, program APBN untuk MSG merupakan sarana pelatihan bangsa bagi puluhan-juta petani gurem , wirausahawan kecil dan masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam rantai nilai MSG , kalau pemerintah memang bermaksud membangun ekonomi kerakyatan dengan APBN Belanja MSG sebesar 600 Triliun pertahun .

Sesuai teori pembangunan ekonomi, program MSG NKRI diyakini berdampak amat positif ; meningkatkan perekonomian rakyat berbasis pertanian-pangan dan UMKM Jasa Boga , memberi lapangan kerja nan-luas bagi pekerja-nir ijazah sepanjang rantai-nilai MSG, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, meningkatkan PDB karena kandungan lokal MSG diwajibkan hukum-positif.

NKRI melakukan patok-duga beberapa negara yang telah menerapkan program sejenis MSG, untuk menghindari menginjak kulit pisang yang sama. Program yang melibatkan puluhan-juta partisipan program MSG amat rentan KKN.

1. INDIA.

Di India, Program Makan Siang Gratis di Sekolah di India, yang dikenal sebagai “Mid-Day Meal”

(MDM), dilatarbelakangi oleh kekurangan gizi pada jenjang anak sekolah.

- India dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat kurang gizi yang tinggi, dengan empat dari sepuluh anak mengalami kurang gizi.
- Pemerintah India kemudian meluncurkan program makan siang gratis pada tahun 1995 untuk meningkatkan kehadiran sekolah dan bertujuan mengurangi kelaparan, program ini mencakup 125 juta anak di sekolah negeri serta sekolah bantuan pemerintah.
- Program ini membutuhkan APBN sekitar US\$ 2,8 miliar,
- Studi WFP PBB menunjukkan bahwa dari setiap US\$ 1 yang digunakan untuk program Makan Siang di Sekolah, dapat mendorong dampak ekonomi sebesar US\$ 9.
- Pendanaan program ini diatur oleh Undang-Undang Ketahanan Pangan dengan skema pembiayaan dibagi antara pemerintah pusat dan negara bagian dengan rasio 60:40 (MD Asraul Hoque, 2024).
- Program ini melibatkan kerja sama antar Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian. dan lembaga swadaya masyarakat .
- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan meningkatkan efektivitas distribusi makanan.

- Sebanyak 30% pengadaan makanan harus disuplai dari kelompok tani lokal guna mendukung ekonomi lokal dan memastikan keberagaman gizi.
- LSM yang membantu dalam implementasi *Mid Day Meal Scheme (MDMS)* diantaranya Akshaya Patra Foundation, Nandi Organization, dan Annamrita. Setiap LSM memiliki tugas dan fungsinya masing-masing guna mengimplementasikan program yang lebih efektif dan menjangkau lebih banyak anak-anak di seluruh negeri (Tattwamasi Paltasingh & Prakash Blue, 2022).

Penjelasan sbb :

- a. Akshaya Patra Foundation. Akshaya Patra Foundation adalah salah satu LSM yang paling terkenal dalam mendukung program makan siang gratis di India. Mereka bekerja sama dengan pemerintah untuk menyediakan makanan bergizi kepada lebih dari 1,8 juta anak-anak di lebih dari 20.000 sekolah di seluruh negeri.
 - b. Nandi Organization. Nandi Organization yang terlibat dalam program MDMS ini membantu dalam aspek pengadaan dan penyajian makanan yang bergizi kepada anak-anak di sekolah.
 - c. Annamrita. Annamrita berkontribusi dalam program MDMS dengan fokus pada menyediakan makanan yang seimbang dan bergizi kepada anak-anak di sekolah
- Dalam konteks Implementasi penyaluran, India menyalurkan Program Mid-Day Meal Scheme melalui beberapa langkah terstruktur (Zoomers, 2014):
 - d. Makanan disiapkan di dapur umum atau dapur sekolah yang ditunjuk berdasarkan pemfokusannya pada penggunaan bahan lokal, dibawah pengawasan kepolisian MSG, ahli kesehatan dan gizi bersertifikat.
 - e. Setelah makanan dimasak, makanan tersebut diangkut ke sekolah menggunakan kendaraan yang sesuai guna memastikan makanan tetap dalam kondisi baik hingga sampai ke siswa.
 - f. Di setiap sekolah, guru dan staf bertanggung jawab untuk menyajikan makanan kepada siswa agar memastikan semua anak menerima porsi yang cukup
 - Pemerintah India memastikan bahwa makanan yang disediakan dalam Program MDMS memenuhi standar gizi dengan tujuan untuk meningkatkan status gizi anak-anak dan mengurangi masalah kelaparan di kalangan siswa yang mana menjadi hal utama yang melatarbelakangi diadakannya Mid Day Meals program.
 - Pemerintah India melakukan beberapa upaya di antaranya :
 - a. Regulasi MSG. Program ini diatur dalam Undang-Undang Ketahanan Pangan (National Food Security Act.), yang menetapkan standar gizi minimum untuk makanan yang disajikan kepada anak-anak di sekolah. Selain undang-undang tersebut, regulasi juga turut disebutkan dalam Mid-Day Meal Rules. Aturan ini

dikeluarkan pada September 2015 dan merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Ketahanan Pangan.

- b. Aturan ini memastikan bahwa makan siang yang disediakan harus memenuhi standar gizi yang ditetapkan pemerintah dan *setiap anak yang tidak dapat menerima makan siang, misalnya pada remote area, pulau terpencil) harus mendapatkan bantuan biaya memasak dari APBN MSG pemerintah.*
- c. Pengawasan dan Pemantauan. Ada sistem pemantauan yang ketat untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan. Pemerintah melakukan evaluasi berkala untuk menilai kandungan gizi dan kebersihan makanan yang disediakan. Selain itu, pengawasan ini juga bertujuan untuk meminimalisasi terjadinya risiko korupsi
- d. Keterlibatan Ahli Gizi dan Kesehatan / Higiene. Program MDM melibatkan ahli gizi dalam perencanaan menu untuk memastikan bahwa makanan tidak hanya aman (yaitu tidak mengandung bakteri, zat berbahaya, pengawet dan sudah busuk) tetapi juga bergizi dengan mempertimbangkan kebutuhan gizi anak-anak

Program MDM memiliki pengaruh signifikan terhadap output pendidikan seperti:

- a. Meningkatnya Kehadiran Sekolah. Program ini memberikan insentif secara tidak langsung bagi anak-anak dari kalangan kurang mampu untuk bersekolah, karena mereka mendapatkan makan bergizi gratis. Hal ini terbukti sebagaimana dipaparkan oleh salah satu guru di India yang menyebutkan kehadiran siswa meningkat secara signifikan setelah program diimplementasikan.
- b. Peningkatan Kesehatan dan Konsentrasi. Makanan yang sudah terukur dari segala aspek, termasuk diantaranya perhitungan gizi, dipastikan membantu meningkatkan kesehatan fisik dan mental anak-anak, meningkatkan kemampuan belajar dan berkonsentrasi di kelas.
- c. Dampak antar generasi. Program ini tidak hanya bermanfaat bagi penerima langsung tetapi juga bagi generasi berikutnya, dengan data menunjukkan peningkatan pertumbuhan dan status gizi anak-anak yang lahir dari ibu yang mendapatkan manfaat dari program ini. Penelitian menunjukkan bahwa skor HAZ anak-anak yang lahir dari ibu yang menerima MDM lebih besar dibandingkan dengan anak-anak yang lahir dari ibu yang tidak ikut MDM. Berdasarkan data / temuan riset, disimpulkan bahwa MDM berkontribusi terhadap 13-32% peningkatan HAZ di India sepanjang tahun 2006 hingga 2016
- d. Perbaikan Tingkat Stunting dan Melek Huruf. Program MDM juga memberikan perbaikan signifikan terhadap tingkat stunting dan melek huruf di India. Anak-anak yang menerima makanan sekolah gratis memiliki kemungkinan lebih rendah untuk mengalami stunting dan berpeluang memiliki kemampuan melek huruf yang lebih baik (MD Asraul Hoque, 2024).

Selain berdampak dalam sisi akademis tersebut di atas, Program MDM ini juga memiliki efek positif lain di antaranya:

- a. Peningkatan Produksi Pangan Lokal. *Implementasi program MDM telah mengubah pertanian India*. Pasalnya, regulasi India yang mewajibkan bahan baku harus berasal dari lokal membuat para petani/produsen gurem terdorong untuk meningkatkan produksi pangan lokal.
- b. Mendukung Kebijakan substitusi impor. Hal ini berdampak positif terhadap keberhasilan India meningkatkan produksi susu secara signifikan dan mengubah status dari sebelumnya importir susu *menjadi eksportir susu*. Akibatnya, *India kini merupakan produsen susu terbesar di dunia dengan 24% dari produksi susu global* (WFP, 2018).
- c. Peningkatan Lapangan Kerja. Program MDM juga turut berkontribusi mengurangi angka pengangguran di India. Program MDM ini tercipta banyak lapangan kerja baru sepanjang rantai-pasok dari bibit bagi petani sampai makanan-siap-saji, seperti pasar bibit, petani gurem, jaringan pasok hasil-bumi kepada penyedia makanan di dapur sekolah sekolah yang meliputi juru masak dan pengemasan, pengawas kesehatan dan gizi.

Program Bawa Pulang (*Take Home Ration*) mempunyai komponen rantai nilai sbb :

2. Pengadaan berbasis kontrak-pemerintah, harus transparan.
3. Model produksi terdesentralisasi berkualitas tinggi, melibatkan masyarakat/komunitas penerima, berkesinambungan, antaran tepat waktu, pemberdayaan perempuan.
4. Manajemen rantai-pasok berbasis aplikasi HP dan gerbang maya berkualitas tinggi, manajemen pengiriman/distribusi nan modern dan tepat-guna, pengawasan distribusi berbasis aplikasi.
5. Formulasi produk tersesuai asupan protein, lemak dan densitas dengan kriteria bertaraf global, berbasis keaneka-ragaman budaya/cita-rasa lokal, trerformulasi bahkan bagi masyarakat mal-nutrisi akut.

2.NIGERIA.

Program *National Home Grown School Feeding* (NHGSFP) di Nigeria adalah sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan hasil belajar anak-anak melalui penyediaan makanan bergizi di sekolah. Meskipun tidak sepopuler program di India atau Brazil, NHGSFP masih memiliki peran penting dalam meningkatkan kesehatan dan pendidikan anak-anak.

- Latar belakang dari hadirnya program ini adalah pemerintah masih melihat kurangnya gizi, khususnya bagi anak-anak. Dengan menyediakan makanan bergizi, program ini berusaha untuk mengurangi masalah kurang gizi pada anak-anak. NHGSFP juga didasari tujuan meningkatkan tingkat registrasi sekolah dan mengurangi tingkat putus sekolah. (Elda N. Okolo-Obasi & Joseph I. Uduji, 2022)
- Sampai tahun 2021, Program NHGSFP ini memiliki cakupan total penerima sebanyak 9.887.000 siswa sekolah dasar.
- Pemerintah Nigeria saat ini memiliki rencana untuk menggandakan program pemberian makanan di sekolah ini dari jumlah anak yang mendapatkan makanan sebesar 10 juta menjadi 20 juta pada tahun 2025.

Rencana ekspansi ini merupakan bagian dari strategi “*Renewed Hope*” untuk meningkatkan kesehatan dan pendidikan anak-anak (GCNF Global Survey, 2021)

- Program ini wajib menggunakan bahan makanan yang ditanam oleh petani kecil lokal untuk memastikan keberagaman gizi dan mendukung ekonomi lokal.
- Terkait distribusi dan penyajian, NHGSFP memiliki sistem dimana makanan disajikan di sekolah, dengan fokus pada kualitas dan kebersihan makanan. Juru masak lokal dipekerjakan untuk memasak makanan dan mendistribusikannya ke anak-anak.
- Program ini juga melibatkan kerja sama antar kementerian, termasuk diantaranya Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Keuangan. (Elda N. Okolo-Obasi & Joseph I. Uduji, 2022). Program National Home Grown School Feeding (NHGSFP) di Nigeria memiliki dampak yang signifikan terhadap siswa (Bosah Chukwuebuka & Obumneke Okeke, 2019) sbb :
 - a. Peningkatan Kehadiran Sekolah. Program ini membantu meningkatkan tingkat kehadiran siswa di sekolah, terutama di kalangan anak-anak dari keluarga kurang mampu, dengan menyediakan makanan bergizi yang mendorong mereka untuk datang ke sekolah secara teratur. Program makan gratis Nigeria ini meliputi *sarapan, makanan ringan, dan Take Home Rations*.
 - b. Perbaikan Nutrisi. Dengan menyediakan makanan yang bergizi, program ini berkontribusi pada peningkatan status gizi anak-anak, membantu mengurangi masalah kekurangan gizi dan stunting. Guna mengawasi jalannya program ini, Pemerintah Nigeria telah menetapkan Dewan Komite Pengawas untuk memastikan bahwa standar gizi dan kebersihan makanan selalu dipenuhi.
 - c. Peningkatan Kinerja Akademis. Program NHGSFP ini turut membantu meningkatkan energi dan konsentrasi siswa selama kegiatan belajar mengajar siswa, yang berdampak positif pada kinerja akademis mereka. Selain peningkatan secara akademis, Program HGSFP berperan penting dalam mengurangi angka putus sekolah, karena memberi insentif bagi keluarga untuk menjaga anak-anak mereka tetap bersekolah.

Program National Home Grown School Feeding (NHGSFP) di Nigeria turut memiliki dampak ekonomi yang signifikan, termasuk peningkatan pendapatan petani, pembangunan ekonomi lokal, pembuatan lapangan kerja, dampak pengganda ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan keluarga (Ogunode Niyi Jacob & Abubakar Musa, 2021).

- a. Peningkatan Pendapatan Petani, karena program berfokus pada penggunaan bahan makanan dari petani kecil lokal, membantu meningkatkan pendapatan petani dan mempromosikan pertanian lokal, yang berdampak positif pada ekonomi-pedesaan dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan makanan
- b. Pembangunan Ekonomi Domestik cq Lokal. Dengan regulasi untuk membeli bahan makanan dari petani lokal, program NHGSFP membantu membangun ekonomi lokal, karena dana APBN yang digunakan untuk membeli makanan akan tetap di dalam wilayah daerah penerima paket MSG, yang secara langsung meningkatkan aktivitas ekonomi, produktivitas pertanian rakyat, nelayan, petambak rakyat dan PDB ekonomi di daerah tersebut.

- c. Pembukaan Lapangan Kerja. Program MSG menciptakan lapangan kerja baru di sektor makanan, dari hulu ke hilir, sejak panen-bahan pangan, distribusi hasil panen ke dapur, juru masak hingga pengantar makanan. Setiap dapur mempekerjakan lima tenaga kerja. Dengan asumsi satu dapur untuk setiap titik makan siang, maka akan terdapat sekitar 377.000 dapur yang dapat mempekerjakan 1,8 juta tenaga kerja.
- d. Program NHGSFP ini berhasil menciptakan lebih dari 100.000 lapangan pekerjaan yang mana hal tersebut merupakan hal yang sangat positif mengingat pertambahan lapangan pekerjaan dapat meningkatkan dampak ekonomi terhadap global. Pekerjaan baru yang tercipta diantaranya 120.000 juru masak dan asisten koki, 5.000 manajemen dan jasa pemantauan/pemeriksa higiene makanan, 5.000 Off site Processors, 2000 pengemas makanan, 1000 pengantar makanan, dan 550 pengawas kualitas dan keamanan makanan
- e. Efek Pengganda Ekonomi. Dengan menggunakan asumsi multiplier ekonomi 1,5x, program NHGSFP dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3%, yang berarti bahwa setiap investasi dalam program MSG dapat berdampak lebih luas pada ekonomi nasional
- f. Peningkatan Kesejahteraan Keluarga. Program NHGSFP ini tidak hanya membantu meningkatkan kesehatan & kinerja hasil sekolah dan kecepatan masuk lapangan kerja formal sehingga meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- g. Dengan meningkatkan pendapatan petani, nelayan, peternak dll dan rantai pasok yang menciptakan lapangan kerja, program ini dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebagai misal, bila setiap keluarga miskin mendapat tugas pemerintah untuk penyediaan makanan 100 set, dan bila mendapat untung-bersih Rp.1.000 per set, maka keluarga tersebut mendapat penghasilan Rp.100.000 perhari atau Rp. 3 Juta perbulan.

3. BRAZIL

Program makan gratis di Brazil, dikenal sebagai *Programa Nacional de Alimentação Escolar* (PNAE). PNAE dirancang untuk meningkatkan gizi anak-anak, mengurangi kelaparan, dan mendukung pendidikan dengan menyediakan makanan sehat di sekolah-sekolah.

- Makanan di sekolah harus memenuhi minimum 15% dari kebutuhan gizi harian siswa.
- Program ini menyediakan makanan di lebih dari 150.000 sekolah, dengan menu yang bervariasi seperti nasi, sayuran, daging, dan buah-buahan. Setiap siswa mendapatkan porsi makanan gratis yang disubsidi oleh pemerintah.
- Biaya per siswa untuk makanan ditanggung oleh anggaran pemerintah federal dan negara bagian, dengan rincian biaya per kapita sekitar R\$1,5 (setara Rp4.400).
- *Program ini merupakan contoh sukses bagi dunia dalam memerangi kemiskinan dan kelaparan melalui penyediaan makanan bergizi di lingkungan pendidikan. (Silva et al, 2022)*

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) memiliki dampak ekonomi yang signifikan diantaranya : (Susan Gracia Arpan & Alfi Sophian, 2024)

- a. Peningkatan Pendapatan Petani karena Program PNAE wajib menggunakan bahan makanan dari petani lokal, sehingga membantu meningkatkan pendapatan petani dan mempromosikan sistem perekonomian berbasis pertanian domestik cq pengembangan ekonomi pedesaan dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan makanan
- b. Pembukaan Lapangan Kerja. Program ini menciptakan lapangan kerja baru di sektor distribusi pangan dan jasa-boga, mulai dari juru masak hingga pengantar makanan, setiap dapur yang digunakan untuk memasak makanan dapat mempekerjakan lima tenaga kerja. Berdasarkan data terdapat sekitar 160.000 sekolah yang berdampak terhadap lapangan pekerjaan sekitar 800.000 tenaga kerja
- c. Dampak Multiplier Ekonomi. Dengan menggunakan asumsi multiplier ekonomi, program PNAE dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3%, Hal ini berarti bahwa setiap investasi jasa-boga swasta dalam program ini dapat berdampak lebih luas pada ekonomi nasional

Selain berdampak terhadap ekonomi, Program makan gratis di Brazil juga memiliki dampak yang signifikan terhadap siswa di antaranya (Fletcher & Frisvold, 2017) sebagai berikut:

- a. Pengembangan Nutrisi yang Seimbang. Menu yang beragam pada Program PNAE ini menekankan pentingnya menu yang selalu memenuhi kebutuhan nutrisi siswa. Menu yang disediakan mencakup nasi, telur, daging, sayuran, dan buah-buahan, sehingga siswa mendapatkan nutrisi yang seimbang
- b. Pembentukan Pola-Pikir (Mindset). Program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga berkontribusi pada pengubahan cara berhubungan dengan makanan. Siswa belajar tentang pentingnya makanan seimbang dan membentuk kebiasaan makan yang sehat.

Distribusi penyaluran program makan gratis di Brazil, yang dikenal sebagai *Programa Nacional de Alimentação Escolar* (PNAE) dilakukan melalui beberapa mekanisme terstruktur: (Silva et al, 2022)

- a. Penyediaan Makanan di Sekolah. Makanan disediakan di lebih dari 160.000 sekolah di seluruh Brazil, dengan anggaran tahunan lebih dari R\$4 miliar. Setiap siswa mendapatkan jatah makanan sehari-hari yang memenuhi minimal 15% dari kebutuhan nutrisinya
- b. Pelibatan Pihak Ketiga Program ini melibatkan kerja sama antara pemerintah daerah dan sektor swasta, seperti donasi dari pengusaha untuk membantu mendanai penyediaan makanan, sektor swasta sebagai juru masak, distributor fisik penyaluran makanan, dan lain-lain.
- c. Pemantauan dan Evaluasi. PNAE dipantau oleh sekitar 80.000 anggota Dewan Makanan Sekolah, yang memastikan kualitas dan keberagaman makanan yang disediakan
- d. *Model Prasmanan*. Di sekolah-sekolah, siswa menerima makanan melalui sistem prasmanan, seperti kantin, yang memungkinkan mereka untuk memilih menu sesuai dengan preferensi mereka.

Melalui mekanisme ini, PNAE tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi siswa tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi domestik dan pengentasan kemiskinan.

Artikel tersebut di atas berguna bagi NKRI.

- Pembelajaran untuk Indonesia Implementasi program penyaluran makanan di India, Nigeria, dan Brazil mampu menjadi pembelajaran bagi Indonesia dalam mewujudkan program Makan Bergizi Gratis yang berpotensi menciptakan dampak positif berantai (*multiplier effect*) yang signifikan bagi masyarakat luas.
- Program pemberian makanan di sekolah merupakan katalisator positif bagi perekonomian, melibatkan beragam aktor dalam rantai pasok, mulai dari penyediaan bahan pangan hingga pengantaran makanan jadi ke sekolah, sehingga program ini membuka potensi yang besar dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
- Penyediaan bahan pangan perlu diarahkan pada pemberdayaan petani lokal, mendorong pertumbuhan sektor pertanian rakyat di masa mendatang.
- Keberagaman bahan pangan di berbagai daerah Indonesia pun memberikan peluang integrasi dalam program MSG untuk memastikan kesesuaian dengan cita rasa dan kebutuhan gizi siswa penerima program.
- Kebutuhan pengolahan bahan pangan menjadi makanan jadi membuka peluang lapangan pekerjaan serta peningkatan produktivitas dan kesejahteraan para pelaku UMKM. Khususnya di kota tier 1 (urban area) dan tier 2 (sub urban area), program ini berpotensi meningkatkan pendapatan bersih UMKM, mendorong pertumbuhan usaha ke tingkat yang lebih tinggi. Berpuluh juta penyerapan tenaga kerja terwujud melalui peningkatan jumlah produksi makanan, melibatkan juru masak, tim pendukung, dan petugas pengemasan. Produktivitas UMKM meningkat seiring dengan pertambahan jumlah pesanan dan tenaga kerja.
- Penyediaan makanan untuk program Makan Bergizi Gratis juga memperkuat peran Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemerintah Daerah. Petugas kebersihan dan keamanan makanan dari Dinkes bertugas memastikan higienitas seluruh proses produksi, menjamin kelayakan konsumsi bagi para murid. Petugas Dinkes juga bertanggung jawab menganalisis kandungan gizi dalam setiap kotak makanan, memastikan kesesuaian dengan panduan gizi piring seimbang dari Kementerian Kesehatan. Terbuka lapangan kerja baru pada setiap Dinas tersebut untuk mendukung program APBN 600 Triliun untuk MSG.
- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinas KUKM) Pemerintah Daerah memiliki peran krusial dalam memberikan pelatihan berkala kepada pelaku UMKM yang terlibat.
 - a. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan keterampilan tenaga kerja UMKM dalam mengolah dan menyajikan makanan secara efisien dan efektif.
 - b. Proses distribusi/pengantaran bertahap sejak pagi hari ke setiap sekolah memerlukan persiapan matang dan kehandalan di setiap tahapan. Nota
 - c. Keuangan APBN 2025 mengamankan program MBG untuk memberdayakan UMKM. Dinas KUKM dan Dinkes wajib bersinergi dalam menyukseskan program Makan BergiziGratis di daerahnya .

- d. Pengantaran makanan ke sekolah di perkotaan tier 1 dan tier 2 di Indonesia pun dapat dioptimalkan melalui kolaborasi dengan mitra pengemudi dari layanan aplikasi ride-hailing. Program Makan Bergizi Gratis memberikan kepastian pesanan pengantaran makanan bagi mitra pengemudi di daerah masing-masing. Sistem dan standar yang telah mapan pada layanan aplikasi transportasi daring—meliputi kelengkapan data mitra pengemudi, estimasi waktu pengantaran, hingga konfirmasi penerima paket makanan—menciptakan mekanisme penyaluran makanan dari UMKM ke sekolah yang efisien.

Pihak layanan aplikasi bertanggung jawab memastikan berlangsungnya proses pemantauan, evaluasi, dan pembelajaran secara berkelanjutan untuk menjaga kualitas pengantaran makanan.

- Mengingat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang bertahap, *penentuan sekolah dan siswa penerima program memerlukan keterlibatan Dinas Pendidikan (Disdik) Pemerintah Daerah*. Keterlibatan ini penting untuk memastikan kesesuaian sekolah yang dituju dengan prioritas penerima manfaat program.
- Nota Keuangan APBN 2025 menetapkan prioritas penerima manfaat pada tahun 2025 adalah peserta didik di kabupaten/kota dengan kasus stunting dan kemiskinan tinggi, serta daerah yang telah memiliki kesiapan fasilitas sarana dan prasarana untuk menjalankan program.
- Seluruh perangkat sekolah yang ditunjuk perlu mendapatkan sosialisasi komprehensif guna mempersiapkan diri dalam implementasi program di sekolah masing-masing.

DAMPAK PENERIMAAN BUKAN PENDAPATAN NEGARA YANG BERBENTUK UTANG LN

Kabinet gemar utang mewariskan beban arus-kas keluar APBN Kabinet selanjutnya, beban bunga utang LN mengurangi porsi belanja APBN lain.

Penerimaan kas negara tak selalu berbentuk pendapatan negara, kemampuan sebuah kabinet di ukur dengan

- kinerja kemampu-bayar-an yang terbukti oleh kinerja penurunan pokok Utang Warisan Kabinet Lalu,
- kinerja untuk tidak-ber-utang,
- kinerja ke-mampu-bayar-an yang terbukti oleh penurunan saldo utang buatan kabinet itu sendiri
- kesadaran diri Kabinet dan kemampuan menekan beban bunga utang negara untuk perluasan-ruang APBN yang akan datang, dan
- Kabinet sadar kebangkrutan , yang mempunyai program untuk menjauhkan negara dari posisi bangkrut bahkan risiko “menjual kemerdekaan” kepada negara-lain yang mampu menolong keluar dari posisi-bangkrut dan/atau lembaga penyandang-dana dunia seperti IMF atau semacamnya.

Pada umumnya Kabinet menggunakan batasan nisbah DSR tertentu dan perencanaan/skenario arus-kas masa-depan.

Tataran konseptual teoretis manajemen utang-negara adalah sebagai berikut.

Dampak negatif

- Membebani ekonomi negara, terutama jika jumlahnya terus meningkat
- Menimbulkan ketidakstabilan APBN
- Memicu inflasi
- Menghambat investasi dari luar negeri
- Mengakibatkan ketergantungan terhadap pemberi bantuan luar negeri
- Memeragkan kedaulatan negara

Dampak positif

- Membantu membiayai pembangunan, seperti proyek infrastruktur penting bagi perekonomian bangsa cq meningkatkan PDB dan mengurangi pengangguran
- Menurunkan angka kemiskinan
- Meningkatkan penerimaan pemerintah pusat
- Memperkuat cadangan devisa
- Menstabilkan neraca pembayaran

Untuk mengelola utang negara secara efektif, pemerintah dapat:

- Mengatur batasan utang, menyadari bahwa kewajiban bunga/denda di masa yang-akan-datang akan melukai/memotong mata anggaran belanja yang lain
- Mengadopsi kebijakan pengelolaan utang yang berfokus pada keberlanjutan fiskal,
- Mendiversifikasi sumber utang,
- Menggunakan dana utang secara produktif , terutama membangun kapasitas produktif bangsa, misalnya prasarana-strategis, bukan untuk belanja rutin (blunder ber-APBN).

Berapa besar gangguan utang-negara pada arus kas masa depan, berapa besar beban bunga/denda memotong belanja di masa depan ?

Arrijal Rachman , 2025, mengunggah artikel berjudul *APBN Defisit, Pemerintah Tarik Utang Baru Rp250 T Dalam 3 Bulan* , sumber CNBC Indonesia., antara lain mengungkapkan bahwa untuk menambal target defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada 2025 yang sebesar Rp 616,2 triliun atau setara 2,53% dari PDB, pemerintah sudah merealisasikan penarikan utang baru senilai Rp 250 triliun dalam tiga bulan pertama tahun ini.

- Penarikan utang baru untuk pembiayaan anggaran itu sudah sebesar 40,6% dari target defisit. Sedangkan realisasi defisit APBN per akhir Maret 2025 senilai Rp 104,2 triliun, atau 0,45% dari PDB. Nilai defisit itu baru 16,9% dari target yang telah ditetapkan dalam APBN 2025.
- "Kita akan tetap menjaga APBN dan terutama utang dan juga defisit kita secara tetap prudent, transparan, hati-hati," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

- Realisasi pembiayaan anggaran yang senilai Rp 250 triliun per akhir Maret 2025 itu jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan tiga bulan pertama pada tahun anggaran 2024 yang hanya sebesar Rp 85,6 triliun. Sejarah mencatat bahwa target pembiayaan anggaran pada 2024 sedikit lebih kecil, yaitu hanya Rp 522,8 triliun.
- Adapun rincian pembiayaan anggaran gali lubang tutup lubang per 31 Maret 2025 itu berasal dari penarikan utang senilai Rp 270,4 triliun dikurangi dengan pembiayaan non utang sebesar Rp 20,4 triliun.
- Untuk penarikan utang baru sendiri, atau yang disebut dalam postur APBN sebagai pembiayaan utang sudah terealisasi Rp 34,8% dari target Rp 775,9 triliun sepanjang 2025., sedangkan pembiayaan non utang sudah terealisasi Rp 12,8 triliun dari target minus Rp 159,7 triliun.
- Rincian dari pembiayaan utang yang sebesar Rp 270,4 triliun berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) secara netto senilai Rp 282,6 triliun, atau setara 44% dari target APBN 2025 Rp 642,6 triliun.
- Pinjaman netto minus Rp 12,3 triliun atau negatif 9,2% dari target Rp 133,3 triliun.
- Penerbitan SBN dalam tiga bulan pertama tahun ini yang sebesar Rp 282,6 triliun jauh lebih tinggi dari realisasi pada periode yang sama tahun lalu senilai Rp 104 triliun, sedangkan yang berasal dari pinjaman jauh lebih rendah dibanding tahun lalu yang mencapai Rp 1,6 triliun.
- Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, penarikan utang baru dalam jumlah besar pada awal tahun ini bukan karena pemerintah tidak memiliki penerimaan negara yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan belanja negara, melainkan untuk mengantisipasi gejolak pasar keuangan dunia akibat kebijakan Presiden AS Donald Trump yang kembali meluncurkan perang dagang melalui pengenaan tarif perdagangan yang tinggi kepada semua negara.
- "Kita melakukan *front loading* bukan karena kita enggak punya duit, karena kita memang strategi dari *issuance* kita untuk mengantisipasi ketidakpastian yang pasti akan membuat kenaikan," tutur Sri Mulyani.

APBN PENDAPATAN OLAH-RAGA

Dengan luas negara seluas Eropa dengan 17.000 pulau, NKRI dapat melakukan patok-duga kepada negara-negara turisme dunia, antara lain Spanyol. Sumber TTW, 2025, menyajikan artikel berjudul *Spanyol Muncul Sebagai Pusat Kekuatan Global dalam Pariwisata Olahraga dengan Pertumbuhan Pesat yang Diproyeksikan Akan Melebihi Hampir Enam Puluha Lima Miliar Dolar pada Tahun 2034*, antara lain mengungkapkan bahwa pasar pariwisata olahraga Spanyol siap mengalami pertumbuhan pesat, diperkirakan mencapai USD 64.3 miliar pada tahun 2034, didorong oleh permintaan global dan acara kelas dunia. Spanyol berada di jalur yang tepat untuk menjadi kekuatan dominan dalam pariwisata olahraga global, dengan perkiraan yang memperkirakan pasar akan mencapai sekitar USD 64,341.3 juta pada tahun 2034. Proyeksi ini mencerminkan CAGR yang mengesankan sebesar 13.5%, naik dari perkiraan USD 18,135.6 juta pada tahun 2024.

Terkenal dengan budayanya yang dinamis, kota-kota bersejarah, dan pemandangan alamnya yang indah, Spanyol sebagai negara turisme dunia kini telah mengukuhkan dirinya sebagai tujuan wisata bagi para penggemar olahraga dari seluruh dunia. Reputasi negara ini sebagai tuan rumah acara olahraga ikonik yang dipadukan dengan infrastrukturnya yang terus berkembang mendorong pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam segmen pariwisata yang dinamis ini.

Sektor pariwisata olahraga Spanyol mencakup spektrum pengalaman yang luas; mulai dari turnamen internasional besar dan liga olahraga domestik hingga olahraga petualangan dan acara rekreasi. Selama dekade terakhir, industri ini terus berkembang, dengan kota-kota seperti Madrid, Barcelona, dan Valencia yang memimpin dalam menarik atlet dan penonton, baik itu pertandingan sepak bola di Camp Nou yang legendaris, kejuaraan tenis, balapan Formula 1 yang mendebarkan, atau bersepeda melintasi Pyrenees, Spanyol menawarkan portofolio pengalaman olahraga yang beragam. Pilihan-pilihan ini telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap lintasan pertumbuhan pasar yang tajam, yang menjadi landasan bagi ekspansi lebih lanjut di tahun-tahun mendatang.

Apa yang Mendorong Meningkatnya Pariwisata Olahraga di Spanyol

Beberapa faktor berpengaruh mendorong lonjakan bisnis perjalanan-wisata yang berpusat pada olahraga:

- **Tempat dan infrastruktur olahraga elit:** Spanyol memiliki banyak fasilitas papan atas, mulai dari stadion sepak bola terkenal di dunia hingga lintasan balap dan akademi pelatihan yang dibangun khusus. Aset-aset ini menarik atlet, tim, dan basis penggemar internasional yang besar.
- **Iklim dan geografi:** Dengan iklim Mediterania dan topografi yang bervariasi, Spanyol sangat ideal untuk wisata olahraga sepanjang tahun. Pantai, pegunungan, dan ruang perkotaan semuanya menyediakan kesempatan untuk berbagai olahraga luar ruangan dan air.
- **Mengembangkan minat pada olahraga aktif dan petualangan:** Di luar acara-acara utama, wisatawan makin tertarik pada pengalaman seperti retreat golf, tur bersepeda, wisata hiking, dan olahraga air—yang masing-masing berkontribusi pada pertumbuhan pasar perjalanan khusus.
- **Sinergi budaya:** Turis yang mencari lebih dari sekadar pengalaman di hari pertandingan menemukan nilai dalam perpaduan budaya, kuliner, dan hiburan atletik Spanyol yang sempurna. Perpaduan ini menciptakan pengalaman perjalanan yang tak terlupakan dan meningkatkan kunjungan berulang.

Daya Tarik Pariwisata Olahraga Internasional Spanyol

Spanyol terus menarik penggemar olahraga dari seluruh dunia, terutama dari pasar pengumpan utama seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, dan baru-baru ini, negara-negara ekonomi berkembang di Asia dan Timur Tengah.

Konektivitas negara ini melalui bandara internasional, kereta api berkecepatan tinggi, dan pilihan akomodasi yang luas meningkatkan aksesibilitasnya. Selain itu, paket perjalanan yang kompetitif yang disertai dengan tiket acara, sesi pelatihan, dan tur wisata menjadikan Spanyol pilihan yang menarik bagi pelancong solo maupun rombongan tur.

Jumlah wisatawan tahunan lebih besar dari jumlah penduduk. Khususnya, Spanyol menarik banyak profil wisatawan; mulai dari penggemar dan atlet amatir hingga profesional yang mencari pelatihan performa tinggi atau kamp pra-musim.

Kendala Utama yang Menantang Pasar Turisme Spanyol sbb :

Meskipun pertumbuhannya mengesankan, pasar pariwisata olahraga Spanyol menghadapi beberapa tantangan:

- **Permintaan berfluktuasi sepanjang musim:** Jumlah pengunjung meningkat selama acara utama tetapi dapat menurun secara signifikan selama musim sepi. Hal ini memengaruhi konsistensi pendapatan dan memberi tekanan pada bisnis untuk mendiversifikasi penawaran.
- **Tekanan lingkungan dan keberlanjutan:** Masuknya wisatawan, terutama di kawasan alam yang sensitif, memerlukan praktik pariwisata yang bertanggung jawab. Mengelola limbah, melestarikan ekosistem, dan mempromosikan infrastruktur hijau adalah kunci pertumbuhan berkelanjutan.
- **Kepadatan tempat dan akomodasi:** Acara olahraga populer sering kali menyebabkan fasilitas menjadi penuh sesak, yang berdampak pada pengalaman wisatawan dan kualitas hidup masyarakat setempat. Manajemen keramaian yang efektif dan peningkatan skala infrastruktur sangat penting.
- **Meningkatnya persaingan global:** Negara-negara seperti Italia, Inggris, dan Prancis terus berinovasi dalam bidang pariwisata olahraga. Untuk mempertahankan keunggulannya, Spanyol harus terus meningkatkan penawaran layanan dan integrasi digitalnya.
- **Pergeseran ekonomi** Ketidakpastian ekonomi global dan inflasi dapat memengaruhi anggaran perjalanan, terutama untuk sektor yang tidak penting seperti pariwisata olahraga. Hal ini membuat pasar sensitif terhadap fluktuasi keuangan dan memerlukan strategi penetapan harga yang fleksibel.

Perusahaan-Perusahaan Teratas yang Membentuk Lanskap Pariwisata Olahraga di Spanyol

- Pariwisata Olahraga CN
- Perjalanan Olahraga Kaptiva
- DMC yang ceria
- Tur keliling
- Perjalanan Penting ke Spanyol
- Agensi Olahraga dan Perjalanan Eropa
- Tur Olahraga Spanyol
- Cukup Jelajahi
- Wisata Pantai
- Perjalanan ke Madrid
- Bukan Hanya Turis

Akses penuh ke laporan tersedia di
<https://www.futuremarketinsights.com/reports/spain-sports-tourism-market>

Rincian Pasar Pariwisata Olahraga Spanyol Berdasarkan Segmen

Berdasarkan Olahraga

- Sepak bola)
- Jangkrik
- Motorsports
- Bola basket

- Olahraga lainnya

Berdasarkan Jenis Pariwisata

- Pariwisata Olahraga Berbasis Acara
- Perjalanan Olahraga Nostalgia
- Partisipasi Aktif Pariwisata
- Pariwisata Penonton Pasif

Berdasarkan Target Audiens

- Pria
- Wanita
- anak-anak

Oleh Booking Channel

- Telepon
- Platform online
- Di tempat/Tatap muka

Berdasarkan Jenis Pelancong

- Pelancong domestik
- Turis internasional

Berdasarkan Struktur Tur

- Perjalanan Mandiri
- Grup Tur Berpemandu
- Paket Lengkap

Berdasarkan Kelompok Umur

- 15–25 Tahun
- 26–35 Tahun
- 36–45 Tahun
- 46–55 Tahun
- 56–65 Tahun
- 66–75 Tahun

Tentang Future Market Insights (FMI)

Future Market Insights, Inc., otoritas yang diakui secara global dalam intelijen pasar, menawarkan wawasan terperinci dan panduan strategis di berbagai sektor, termasuk pariwisata, pengemasan, perawatan kesehatan, teknologi konsumen, dan banyak lagi. Dengan lebih dari 400 analis di lebih dari 110 negara, FMI memberikan data khusus kawasan dan prakiraan pertumbuhan untuk mendorong pengambilan keputusan yang tepat. Sebagai organisasi bersertifikat ESOMAR dan pemenang Penghargaan Stevie, FMI adalah sumber terpercaya untuk tren dan prakiraan pasar.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Propenas perlu membuat rencana pemenuhan syarat agar NKRI dapat pindah kelas sebagai Negara Maju.

Budaya bangsa nan-positif dan iklim demokratis adalah syarat utama kemakmuran bangsa, reformasi budaya dan rerata lulusan angkatan-kerja formal menjadi salah satu agenda pembangunan karakter bangsa.

Statistik PDB sektoral amat penting. Manajemen PDB dilakukan Kabinet berdasar PDB Sektoral, misalnya PDB industri oleh K/L Perindustrian, PDB Perdagangan oleh K/L Perdagangan, PDB Pertanian oleh K/L Pertanian dan seterusnya.

Tak ada gunanya mencetak sawah baru 5 Juta Ha kalau konversi sawah menjadi *sarana-ekonomi non-sawah cq bangunan*, tak terkendali. Tak ada gunanya upaya memperbesar penerimaan negara kalau korupsi dan belanja negara tak terkendali.

Dampak Program MSG bagi pertumbuhan ekonomi seharusnya signifikan. Program MSG melibatkan puluhan-juta pelaku-ekonomi, perlu penataan nan-baik.

BRICS dan berbagai kegiatan internasional lain dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan negara.

SDA NKRI amat berlimpah, regulasi dan pengelolaannya dapat menghasilkan tambahan pendapatan negara.

Karena setiap negara adalah unik, maka kiat ber APBN Pendapatan tak-dapat ditiru negara lain. Namun Kabinet NKRI dapat mengambil hikmah dari strategi APBN negara-negara lain, antara lain sebagai berikut:

Berbagai negara berupaya meningkatkan pendapatan negara. Saudi Arabia sedang mengembangkan mata-pendapatan negara yang lain di luar minyak bumi, dengan berbagai bantuan pemikiran berbagai ekonom & pakar-ilmu pemerintahan di muka-bumi.

Saudi Arabia sedang dalam proses penghijauan padang-pasir untuk pembangunan ekonomi pertanian.

Untuk meningkatkan pendapatan negara dan demokrasi/pemerataan vertikal fiksial antar warga dan antar-pemda, Prancis berencana meningkatkan pajak bagi orang kaya dan pajak atas tabungan berjumlah amat-besar dan mengurangi pengeluaran APBN.

Pemerintah Jepang memberi-fokus perhatian & perlindungan kepada kesejahteraan / kemakmuran korporasi dan karyawan korporasi, yang berimbas pada kenaikan pendapatan negara dari pajak-konsumsi.

Luksemburg adalah negara makmur ber PDB tergolong tertinggi-dunia, status-ekonomi impian bagi bangsa-bangsa lain, memiliki industri besar/baja berbasis pengetahuan cq HAKI dan teknologi-digital nan-makmur, sebagai negara-keuangan dunia terkemuka cq pusat

perbankan dunia , meningkatkan pendapatan negara melalui sektor keuangan, perpajakan, perbankan dan perdagangan.

Belgia berada di peringkat keenam di Uni Eropa untuk PDB per kapita, PDB per kapita Belgia jauh di atas rata-rata Uni Eropa apalagi rata-rata dunia. IMF memproyeksikan PDB per kapita Belgia rata-rata sebesar USD 58.256 pada tahun 2025. Karena amat percaya-diri, Belgia memilih strategi defisit APBN Terkendali.

Belanda merupakan negara maju dengan ekonomi yang kuat, ditandai dengan PDB per kapita kelompok 12 tertinggi-dunia dan peringkat kebebasan ekonomi (*economic freedom*) ke 10 dunia , kejayaan negara berbasis sistem ekonomi terbuka yang sangat bergantung pada perdagangan internasional , sehingga industri jasa menyumbang sekitar tujuh persepuluh dari angkatan kerja dan sekitar dua pertiga dari produk domestik bruto (PDB) . Belanda juga memilih strategi defisit APBN Terkendali . Untuk meningkatkan pendapatan negara, pemerintah Belanda meningkatkan penerimaan pajak , meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), meningkatkan penerimaan hibah , melakukan alokasi belanja APBN terfokus untuk mendorong investasi di sektor-sektor yang berpotensi meningkatkan produktivitas nasional, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

India memotong tarif pajak penghasilan (PPh) perorangan untuk memacu daya beli kelas menengah. Insentif pajak ini bertujuan untuk menopang ekonomi India yang melambat karena risiko global yang memburuk. Di India, kebijakan insentif pajak & penurunan tarif pajak dipercaya akan meningkatkan pendapatan negara, kebijakan defisit APBN disengaja cq kebijakan penerimaan pajak negara dan kebijakan *front loading* yang diterapkan pemerintah India, percaya bahwa suku-bunga & biaya pinjaman yang tinggi merugikan perekonomian.fokus pada insentif pajak dan kemudahan akses kredit untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, APBN India dirancang mendorong laju pengentasan kemiskinan, memperbesar akses universal terhadap pendidikan dan kesehatan, peningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi, dan APBN untuk menjadikan India sebagai pusat produksi pangan global (lumbung dunia) , terdapat APBN untuk transformasi pertanian dan UMKM, negara menerapkan teknologi canggih dalam modernisasi pencatatan tanah dan tata kota. Kebijakan Energi dan Pariwisata antar lain berbentuk program akselerasi pertumbuhan sektor energi mendapat dorongan signifikan dengan reformasi kelistrikan serta target pengembangan 100 GW energi nuklir pada 2047. Sektor pariwisata akan mendapat manfaat dari inisiatif PM Gati Shakti, yang bertujuan meningkatkan infrastruktur serta mempromosikan 50 destinasi wisata utama untuk menarik wisatawan global. Kebijakan Ekspor dan Integrasi Global antara lain namun utama adalah Misi Promosi Ekspor, yang difokuskan pada pembukaan akses pasar global bagi UMKM, pembangunan infrastruktur digital Bharat Trade Net (BTN) akan menyederhanakan proses perdagangan, mempercepat dokumentasi ekspor, serta menyediakan solusi pembiayaan terintegrasi, terdapat APBN pembangunan beberapa pusat logistik di kota-kota lapis kedua untuk mendukung ekspor barang bernilai tinggi, termasuk produk hortikultura. Kebijakan Makan Siang Gratis India sejak 1995, bertujuan untuk mengatasi "kelaparan di kelas bawah" dan mendorong anak-anak miskin, yang termasuk kelompok kurang mampu, untuk bersekolah secara teratur dan membantu mereka berkonsentrasi pada kegiatan kelas, sebagai upaya untuk mengatasi masalah ketahanan pangan, kekurangan gizi, dan akses terhadap pendidikan dalam skala nasional, merupakan program pemberian makanan sekolah terbesar di dunia yang menjangkau lebih dari 125 juta anak berusia 6-14 tahun.

Pemerintah AS berupaya meningkatkan pendapatan negara melalui pajak, hibah/grant, dan berbagai transfer lain. Pendapatan Pajak mencakupi PPh (Income taxes) yang dikelola pemerintah pusat AS, Pajak Penjualan (Sales taxes) sebagai sumber utama pendapatan negara, Pajak Properti (Property taxes) sebagai sumber pendapatan pemerintah lokal (setara pemda di NKRI), Pajak lain (Other taxes) yang mencakupi Pajak penjualan barang/jasa tertentu, PBB, Pajak lisensi kendaraan dan Pajak pertambangan.

Pendapatan negara berupa Pemberian Diperjanjikan Di muka (Grants) berbentuk sumbangan, hadiah, warisan, bantuan yang diperjanjikan di muka.

Kebijakan Sumbangan Diperjanjikan Di muka (Grant) AS sbb :

1. Sumbangan Diperjanjikan Pemerintah Pusat (Federal grants) antara lain berupa Medicaid. Medicaid adalah program asuransi kesehatan publik di Amerika Serikat yang membantu warga berpenghasilan rendah mendapatkan perawatan kesehatan. Dalam bahasa Indonesia, Medicaid dapat diartikan sebagai program bantuan cakupan kesehatan. Medicaid didanai oleh pemerintah federal dan negara bagian. Program ini dioperasikan di tingkat negara bagian, sehingga cakupan dan administrasinya berbeda-beda di setiap negara bagian. Medicaid hanya tersedia bagi individu dan keluarga yang memenuhi kriteria pendapatan tertentu, yaitu anak-anak dalam kondisi khusus, orang dewasa dalam kondisi khusus, wanita hamil dalam kondisi khusus, penyandang disabilitas dalam kondisi khusus, warga lanjut usia nan-rentan risiko sosial, dan keluarga pekerja bersyarat khusus.
2. Program Berlomba Kepuncak atau *Race to the Top* (RTTT) adalah program Sumbangan Diperjanjikan kompetitif dari pemerintah Amerika Serikat . Program "Berlomba Menuju Puncak" bertujuan untuk mendorong inovasi masyarakat dan reformasi di tingkat negara bagian.
3. Tunjangan transportasi untuk pemulihan perekonomian atau *Transportation Investment Generating Economic Recovery* , adalah Sumbangan Diperjanjikan bertujuan untuk pemulihan ekonomi berbasis investasi bidang transportasi (grant) , misalnya peringanan pajak kendaraan angkutan barang.
4. Sumbangan Diperjanjikan Pelengkap (*Matching Grants*); Pemerintah Pusat dan Pemda/Negara Bagian wajib menyediakan dana untuk memperoleh bantuan APBN semacam ini. Sumbangan paket-kawinan mencakupi :
 - a. Sumbangan Diperjanjikan untuk Pelestarian Program Berulang (*Maintenance-of-effort grants*). Pemerintah Pusat dan Pemda/Negara Bagian harus memelihara tingkat belanja tertentu yang bersifat abadi , misalnya Belanja Pemeliharaan Waduk , untuk menerima bantuan tersebut.
 - b. Transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah lokal (serupa di NKRI).
5. Pungutan biaya layanan dan penggunaan sarana-publik tertentu (*Service and utility charges*) , misalnya pungutan kepada sekolah tinggi

tertentu, kepada entitas pengelola dana asuransi.

Pemerintah Italia meningkatkan pendapatan-negara melalui strategi menaikkan tarif pajak PPh, PPN, dan PBB, dan hampiran pungutan layanan-publik berbasis digital . Strategi peningkatkan pendapatan negara Italia melalui intensifikasi dan ekstensifikasi semua jenis pajak , pungutan dan layanan-digital.

Pemerintah Argentina berupaya meningkatkan pendapatan negara melalui peningkatan pendapatan pajak, reformasi ekonomi, dan berbagai kebijakan khusus untuk mencegah defisit APBN. Peningkatan pendapatan pajak Argentina dilakukan melalui peningkatan efisiensi penagihan pajak (*Tax collection efficiency*) , reorganisasi Ditjen Pajak dan Bea Meterai untuk pelancaran penagihan pajak, peningkatan basis pajak PPh. Pada bulan Februari 2025 , PPh meningkat 86.5 % mencapai USD 12.107 Miliar. Dampak positif amat-besar tersebut menarik perhatian Kabinet negara lain.

Reformasi Ekonomi Argentina mencakupi kebijakan pengendalian APBN adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah melalui pemotongan belanja APBN tertentu dan/atau kenaikan pajak, bertujuan mengendalikan utang pemerintah dan sektor publik, meningkatkan kesehatan keuangan pemerintah cq mengurangi pembengkakan utang-pemerintah dan risiko gagal bayar dengan manajemen-risiko gagal-bayar dan manajemen-risiko defisit APBN diluar rencana.

Kebijakan SDA (*natural resources*) Argentina mencakupi pemeliharaan posisi negara sebagai produsen industri pangan dan peternakan terkemuka / terbesar dunia, pemanfaatan aset SDA , terutama tambang gas dan berbagai energi terbarukan dan pemanfaatan cadangan tambang Lithium.

Kebijakan Pemerintah Papua New Guinea ditujukan untuk pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan sektor privat, pertumbuhan lapangan kerja formal dan kemakmuran jangka-panjang bukan mengisi kas APBN. Mirip Argentina tersebut di atas, Pemerintah Papua New Guinea berupaya meningkatkan pendapatan negara dengan reformasi- pajak , reformasi ekonomi dan desentralisasi fiskal, strategi pemotongan pajak untuk APBN 2024 dan strategi pemotongan pajak atas surat berharga pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Reformasi administrasi perpajakan untuk peningkatan kepatuhan WP pada hukum perpajakan dalam paket *Medium Term Revenue Strategy (2023-2027)* , kebijakan fiskal pemikat PMA. Reformasi Ekonomi dilakukan untuk mendorong kandungan lokal industri DN dan mengurangi/substitusi impor. Pemerintah Papua menghapus hambatan birokrasi untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan memikat PMA. Kebijakan desentralisasi fiskal melalui pembentukan National Economic and Fiscal Commission (NEFC) yang melakukan penelitian kebutuhan tiap-pemda dan memberi rekomendasi besar dan bentuk alokasi APBN kepada APBD Pemda.

Pendapatan Domestik Bruto per kapita di Korea Selatan tercatat sebesar 49 995,49 dolar AS pada tahun 2023, ketika disesuaikan dengan paritas daya beli (PPP). Pendapatan Domestik Bruto per Kapita di Korea Selatan, ketika disesuaikan dengan Paritas Daya Beli, setara dengan 281 persen dari rata-rata PDB dunia. Berdasar sumber *Our World Data*, Pemerintah Korsel berupaya meningkatkan pendapatan negara melalui Pajak , BM , BUMN , hasil

modal (*capital revenue*), bantuan asing dan ekonomi perdagangan (*trading economics*). Korea adalah negara OECD tergolong paling industrialis , pertumbuhan PDB Bruto sebesar rerata 5.7 % sepanjang 1980-2023 . Pertumbuhan ekonomi Korsel antara lain disebabkan ekspor barang jadi seperti elektronik, tekstil, kapal, mobil, baja dan BBM,namun sumbangan terbesar bagi kemakmuran-ekonomi Korea Selatan yang terbesar adalah sektor manufaktur dan sektor jasa.

Bagi RRC , tak ada perbedaan kegiatan ekonomi dalam negeri dan luar-negeri. Disamping India, RRC dapat menjadi model percontohan yang baik untuk peningkatan pendapatan negara NKRI. Upaya peningkatan pendapatan negara harus selaras upaya peningkatan kemakmuran cq kesejahteraan rakyat cq PDB Perkapita dan pertumbuhan ekonomi , dibentuk melalui kebijakan keamanan & prasarana nan-kondusif bagi perekonomian, kebijakan kerjasama ASEAN, BRICS dll untuk peningkatan volume perdagangan/usaha , kebijakan perpajakan harus bertujuan mendorong pertumbuhan volume bisnis dan kesempatan kerja formal, strategi ber APBN berbasis kebijakan moneter dan stabilitas keuangan, bukan untuk mengisi kas-negara . Pendapatan negara pajak harus digunakan untuk pembangunan/pemeliharaan infrastruktur perekonomian, pembangunan industri dan perdagangan, peningkatan layanan publik dan program sosial, bukan untuk belanja K/L. APBN pendapatan terfokus pada pembangunan prasarana-ekonomi di LN (*Belt and Road Initiative*) , terutama belanja investasi di LN bersasaran-tertentu dan mendorong pertumbuhan ekspor.

Dengan menerapkan berbagai strategi tersebut di atas, pemerintah RRC berusaha untuk meningkatkan pendapatan negara, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai penutup makalah sederhana ini, desain uraian tugas, tanggung-jawab dan sistem penerimaan negara oleh BPN sebaiknya berdasar survei/studi banding ke negara-negara percontohan dan desain oleh konsorsium KAP terbaik dunia , tentu saja didampingi BPK dan KPK. Penulis berpendapat pembangunan sistem tersebut minimum membutuhkan jawdal waktu satu tahun.

Mari mendukung Kabinet untuk membangun kebijakan pro-pertumbuhan ekonomi.

ⁱ Sekali Lagi Tentang Korupsi, Business News 6984/14-11-2003, hal 3.

ⁱⁱ KKN Dalam Ekonomi dan Ilmu Ekonomi , Steve Susanto, Kompas 20 Oktober 2003.